KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III

"PENINGKATAN PEMAHAMAN TERKAIT LEGALITAS USAHA MELALUI VIDEO EDUKASI PADA PELAKU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN KERINCI"

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Venisa Putri, S.Psi**
NIP	**:**	**200303312025052001**
Jabatan	**:**	**Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama**
Instansi	**:**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci**
Angkatan/Kelompok	**:**	**X/IV**
No. Presensi	**:**	**40**
Gelombang	**:**	**I**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKITTINGGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

JUDUL	:	"Peningkatan Pemahaman Terkait Legalitas Usaha melalui Video Edukasi pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci"
NAMA	:	Venisa Putri, S.Psi
NIP	:	200303312025052001
PANGKAT/GOL	:	Penata Muda/III a
JABATAN	:	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
INSTANSI	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci
Angkatan/Kelompok	:	X/IV
NO. PRESENSI	:	40

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi.

Bukittinggi, 17 Oktober 2025

Coach,	Penguji,
Faisal Roza, S.Kom., M.Kom	**Andi Massalinri, AP., M.Si**
NIP. 19761014 200112 1 001	NIP. 19731111 199311 1 002

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan
dan Manajemen Kepemimpinan

SARJAYADI, SS., M.A.P
NIP. 19700304 199603 1 001

BERITA ACARA

SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada Hari	:	Jumat
Tanggal	:	17 Oktober 2025
Pukul	:	08.00 – 17.00 WIB
Tempat	:	PPSDM Regional Bukittinggi

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan X Tahun 2025.

JUDUL	:	"Peningkatan Pemahaman Terkait Legalitas Usaha melalui Video Edukasi pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci"
NAMA	:	Venisa Putri, S.Psi
NIP	:	200303312025052001
PANGKAT/GOL	:	Penata Muda/III a
JABATAN	:	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
INSTANSI	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ANGKATAN/KELOMPOK	:	X/IV
NO. ABSEN	:	40

Dan telah mendapatkan pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

COACH	PESERTA
Faisal Roza, S.Kom., M.Kom	**Venisa Putri, S.Psi**
NIP. 19761014 200112 1 001	NIP. 20030331 202505 2 001
PENGUJI	MENTOR
Andi Massalinri, AP., M.Si	**Ir. Raswan Putra, M.Si**
NIP. 19731111 199311 1 002	NIP. 19680601 199303 1 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan *Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil* ini dengan baik. Penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti Pelatihan Dasar CPNS, sekaligus sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN BerAKHLAK dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Laporan ini berjudul ”Peningkatan Pemahaman Terkait Legalitas Usaha melalui Video Edukasi pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci”. Melalui aktualisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM) mengenai legalitas usaha, sehingga mampu mendukung pengembangan usaha yang berdaya saing, berkelanjutan, serta selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bupati Kabupaten Kerinci, Bapak Monadi, S,Sos., M.Si, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Sarjayadi, SS., M.A.P yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini.
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang telah mendukung dan memfasilitasi pelatihan kegiatan ini.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, Bapak Yoddizal Ali, S.Pd., M.M yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kesempatan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS.
5. Bapak Faisal Roza, S.Kom, M.Kom., selaku *coach* yang telah memberi dukungan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga laporan pelaksanaan aktualisasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ir. Raswan Putra., M.Si., Kepala Bidang Perindustrian selaku mentor yang telah memberikan dukungan penuh.
7. Bapak Andi Massalinri, AP., M.Si yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang telah memberikan masukan.
8. Segenap widyaswara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat selama pelatihan dasar ini.

9. Bapak/Ibu PIC yang telah memberikan arahan, dukungan dan pemberitahuan demi baiknya keberlangsungan latsar CPNS.
10. Keluarga penulis dan teman-teman yang telah mendoakan kelancaran penulis mengikuti pelatihan ini.
11. Keluarga besar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci atas dukungan dan kerjasamanya.
12. Rekan-rekan peserta Latsar CPNS Gelombang I, khususnya Angkatan X Kelompok 4 Tahun 2025 yang telah bersama-sama mengikuti pelatihan ini

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa laporan pelaksanaan aktualisasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap laporan pelaksanaan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi di tempat tugas, serta menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bukittinggi, Oktober 2025
Peserta

Venisa Putri, S.Psi
NIP. 20030331 202505 2 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI i
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 5
C. Ruang Lingkup 6
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA 8
A. Profil Instansi 8
B. Profil Peserta 23
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI 25
A. Deskripsi Isu 25
B. Analisis *Core* Isu 29
C. Rumusan Isu 33
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian *Core* Isu 34
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 36
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi 36
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi 38
C. Matrik Rekapitulisasi Realisasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS (BerAKHLAK) 61
D. Capaian Penyelesaian *Core* Isu 62
E. Manfaat Terselesaikannya *Core* Isu 64
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 67
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 69
A. Kesimpulan 69
1. Aktualisasi/Habituasi Mata Pelatihan 69

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian *Core* Isu 73
3. Capaian Hasil Penyelesaian *Core* Isu 75
B. Rekomendasi 76
1. Untuk Penyelenggara Pelatihan 76
2. Untuk Instansi Asal Peserta 78
LAMPIRAN 80
Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1 81
Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2 94
Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3 110
Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4 127
Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5 142
DAFTAR PUSTAKA 155

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi 37
Tabel 4. 2 Rancangan Aktualisasi 38
Tabel 4. 3 Rekapitulisasi Rencana Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS (BerAKHLAK) 61
Tabel 4. 4 Kondisi Core Isu 62
Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci 9
Gambar 2.2 Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci..... 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1 81
Lampiran 2. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2 94
Lampiran 3. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3 110
Lampiran 4. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4 127
Lampiran 5. Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5 142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap individu memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peran ASN tidak hanya sebatas melaksanakan tugas administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan peran tersebut, ASN perlu berpegang pada nilai dasar BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang menjadi pedoman perilaku dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut juga menjadi landasan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2021. Pelatihan dasar ini bertujuan membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui kegiatan aktualisasi dalam Latsar, peserta didorong untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam bentuk gagasan atau inovasi sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan kerja maupun masyarakat

sekitar. Dengan demikian, pelatihan dasar tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga wadah bagi calon ASN untuk menunjukkan perannya sebagai pelayan publik yang mampu menghadirkan solusi nyata di lapangan.

Salah satu isu yang masih banyak ditemui di lapangan adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Padahal, sektor IKM memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi, 2022). Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) tidak hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat berkembang secara berkelanjutan, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) membutuhkan kepastian hukum melalui kepemilikan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM. Dengan adanya legalitas usaha, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan usahanya, memperoleh akses ke berbagai program pemerintah, serta meningkatkan peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan platform digital (Tantowi dkk., 2023).

Kenyataannya, masih banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci yang belum memiliki legalitas usaha. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, rendahnya tingkat

kepemilikan legalitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti anggapan bahwa pengurusan izin terlalu rumit, rendahnya pemahaman terkait manfaat legalitas, serta terbatasnya informasi mengenai prosedur perizinan yang sebenarnya sudah jauh lebih sederhana melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kondisi ini menyebabkan pelaku industri kecil dan menengah sering terhambat dalam mengembangkan produk, tidak memiliki akses permodalan resmi, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh bantuan maupun program pemberdayaan dari pemerintah.

Permasalahan tersebut tentu berdampak luas. Bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), tidak adanya legalitas berarti terbatasnya ruang gerak usaha dan rendahnya daya saing produk. Bagi konsumen, kondisi ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, rendahnya kepemilikan legalitas usaha dapat menghambat terwujudnya iklim usaha yang sehat serta menurunkan potensi kontribusi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap perekonomian daerah. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah ditegaskan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar, daya saing, dan akses ke berbagai sumber daya produktif. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menempatkan legalitas sebagai prasyarat utama bagi pelaku usaha, termasuk industri kecil dan

menengah (IKM), untuk berkembang sekaligus memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, ASN dituntut untuk mampu menghadirkan inovasi sederhana namun efektif yang dapat membantu pelaku industri kecil dan menengah (IKM) memahami pentingnya legalitas usaha. Selama ini, sosialisasi dan pendampingan umumnya dilakukan melalui pertemuan tatap muka, yang tentu memiliki keterbatasan baik dari sisi waktu, biaya, maupun jangkauan. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif yang lebih kreatif dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu solusi yang relevan adalah pembuatan video edukasi tentang pentingnya legalitas usaha.

Media video dipilih karena memiliki daya tarik visual, mudah dipahami, dan dapat disebarkan secara luas melalui media sosial maupun platform komunikasi yang sudah akrab dengan masyarakat. Melalui video, informasi mengenai pentingnya legalitas usaha dapat disampaikan secara lebih menarik, sehingga pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat memahami manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha, mulai dari peningkatan kepercayaan konsumen hingga peluang untuk mengakses program pembinaan dan dukungan pemerintah. Dengan demikian, penyampaian informasi tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, inovasi ini kemudian dirumuskan dengan judul **"Peningkatan Pemahaman Terkait Legalitas**

Usaha Melalui Video Edukasi pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci". Melalui inovasi ini, diharapkan pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat meningkat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengurus legalitas usahanya. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong industri kecil dan menengah (IKM) lokal agar lebih berdaya saing, terintegrasi dalam ekosistem usaha yang sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Langkah sederhana ini sekaligus menjadi wujud implementasi nilai ASN BerAKHLAK, serta mendukung terwujudnya visi "Perindustrian dan Perdagangan yang Lebih Baik" di Kabupaten Kerinci.

B. Tujuan

1. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
2. Mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta peran Smart ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Memberikan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong optimalisasi kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci.
4. Mendukung visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci dalam menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang tangguh, berdaya saing, serta mampu berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rancangan aktualisasi ini antara lain:

1. Subjek: Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci, khususnya yang belum memiliki legalitas usaha secara lengkap.
2. Lokasi: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci sebagai instansi pelaksana, dengan sasaran pelaku industri kecil dan menengah (IKM) melalui media digital yang dapat diakses dari wilayah domisili masing-masing.
3. Materi: Edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha secara umum, meliputi:
   - Nomor Induk Berusaha (NIB)
   - Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
   - Sertifikasi Halal
   - Izin Edar BPOM dan Notifikasi Kosmetik
   - Izin Lingkungan

   Materi akan menekankan manfaat dan urgensi memiliki legalitas usaha, serta informasi sumber resmi untuk pengurusan lebih lanjut, tanpa masuk ke panduan teknis langkah demi langkah.
4. Metode: Pembuatan video edukasi sederhana berisi penjelasan mengenai manfaat, jenis-jenis legalitas usaha, serta arahan umum untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Video akan disebarkan melalui platform digital seperti WhatsApp dan media sosial agar mudah diakses oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

5. Batasan: Kegiatan hanya berfokus pada pemberian pemahaman melalui media edukasi digital, tidak mencakup pendampingan teknis langsung dalam proses pengurusan legalitas usaha.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

1. Sejarah Lembaga

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang industri, perdagangan, dan pembinaan pelaku usaha. Sebelumnya, instansi ini tergabung dalam Dinas yang membawahi bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Namun melalui perubahan struktur organisasi daerah, instansi tersebut kemudian dilebur menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terpisah dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Hal ini tercermin dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019, yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas tersebut. Saat ini, Disperindag Kabupaten Kerinci berkedudukan sebagai instansi strategis yang bertugas mendukung perekonomian lokal lewat pengaturan pasar, pengawasan perdagangan, dan pengembangan UMKM.



Gambar 2.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci

2. Visi-Misi Lembaga

Visi dan Misi Kabupaten Kerinci

Visi

"Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera"

Misi

1) Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan.
2) Meningkatkan pengembangan ekonomi inklusif berbasis pertanian.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pengarustamaan gender untuk SDM berdaya saing serta ketahanan sosial dan budaya.
4) Meningkatkan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana ekologi.
5) Pengembangan Inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah

serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kerinci maka disusun lah Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Visi:

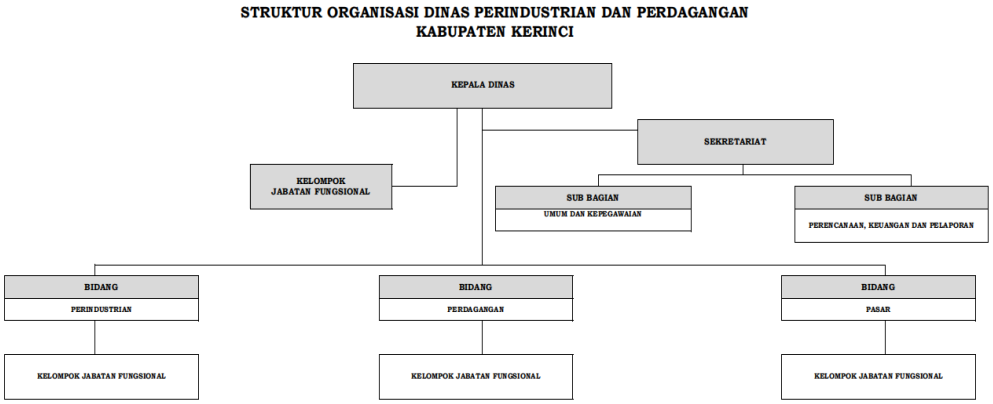
"Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Lebih Baik"

Misi :

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kerinci telah menetapkan 4 Misi yang diemban sebagai berikut :

1) Meningkatkan kinerja dan kualitas sumberdaya aparatur;
2) Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang tangguh dan berdaya saing;
3) Meningkatkan Tertib Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
4) Meningkatkan tata kelola para pedagang/pelaku usaha di pasar tradisional.

3. Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1) SEKRETARIAT:

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan data, pengelolaan urusan umum, keuangan, dan kepegawaian, serta penataan aset dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga barang milik negara dan barang milik daerah;

d. Pembinaan aparatur;

e. Pengelolaan urusan kepegawaian;

f. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;

Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. Menyiapkan bahan-bahan pengoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan indikator kinerja utama dinas;
c. Mengumpulkan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja dinas;
d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, lima tahunan, laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup dinas;
e. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas;

g. Menyusun RKA, DPA, serta DPA Perubahan dengan para Kepala Bidang;
h. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang di ajukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang dan Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
i. Meneliti dan melaksanakan pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran uang;
j. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
k. Menyampaikan laporan keuangan Dinas yang meliputi realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati Kerinci;
l. Membina, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja bawahan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Sub bagian umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. menyiapkan bahan pengordinasian penyusunan rencana operasional dan teknis kegiatan dinas;
c. Menerima, mendistribusikan dan menyampaikan naskah dinas serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan dinas;
d. Menyusun dan mengadministrasikan persuratan dinas;
e. Mengelola dan menyiapkan bahan pembinaan, dokumentasi kearsipan di lingkungan dinas;
f. Melayani keprotokolan, hubungan masyarakat dan menyelenggarakan rapatrapat dinas;
g. Mengurus kerumatanggaan, memelihara kebersihan Gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
h. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
i. Mengelola dokumentasi dan perpustakaan dinas;
j. Mengelola administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, Kartu Pegawai, Kartu Isteri/ Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan penilaian kinerja pegawai;
k. Mengumpulkan, menyimpan dan memelihara data dokumentasi kepegawaian dinas;
l. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan formasi, mutase pegawai, dan pengembangan karier pegawai;

m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dilingkungan dinas;
n. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Perindustrian. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di bidang perindustrian;
b. Penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perindustrian;
c. Penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
d. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidan perindustrian;
e. Pengoordinasian pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perindustrian;
f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian;

g. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
i. Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Penyiapan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perindustrian;
k. Pengkajian dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menginventarisasi sarana usaha dan pemanfaatan tehnologi tepat guna oleh pelaku usaha di bidang perindustrian;
l. Pengoordinasian dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh pelaku usaha industri;
m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi lintas sektor bidang perindustrian;
n. Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sarana danpengembangan usaha industri, bimbingan produksi serta

pengawasan dan pengendalian industri agar kegiatan dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat;

o. Penyiapan konsep rekomendasi perizinan di bidang Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. Pengkajian dan perencanaan upaya peningkatan dan pengembangan sektor industri di daerah;
q. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
r. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, Pengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Perdagangan. Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Perdagangan;

b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang Perdagangan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Perdagangan;
d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perdagangan;
e. Penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
f. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
h. Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Penyiapan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan;
j. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan bidang Promosi, Pemasaran dan sarana perdagangan, kemetrologian,

perlindungan konsumen, pengadaan dan distribusi serta pengembangan perdagangan;

k. Pelaksanaan pembinaan dan upaya pengembangan di bidang promosi, ekspor dan impor daerah;
l. Pengkoordinasian dan pelaksanakan pembinaan di bidang usaha dan sarana perdagangan, kemetrologian, perlindungan konsumen;
m. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemantauan pengadaan / distribusi barang dan jasa;
n. Pemantauan pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha/organisasi/asosiasi di bidang usaha perdagangan;
o. Pelaksanaan upaya pengembangan dan pemantapan jaringan distribusi perdagangan;
p. Pelaksanaan pemantauan perkembangan harga barang khususnya bahan kebutuhan pokok dan bahan penting/strategis;
q. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang, pengawasan, reparasi alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya;
r. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
s. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

4) BIDANG PASAR

Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, menyusun program, penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pasar. Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis, dan naskah dinas di bidang pasar;
b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang pasar;
c. Pengoordinasian pembinaan dan pengendalian di bidang pasar.
d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pasar;
e. Penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan danperaturan perundang-undangan;
f. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

h. Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Penyiapan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pasar;
j. Penetapan kebijakan dalam rangka optimalisasi Penerimaan retribusi dari sektor pasar agar dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan;
k. Perumusan potensi pasar daerah sehingga dapat diselenggarakan pelayanan yang prima dan tepat bagi masyarakat;
l. Penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pasar kepada pedagang, paguyuban pedagang, dan masyarakat lainnya;
m. Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan operasional kegiatan pembinaan pedagang pasar, intensifikasi, retribusi, pemeliharaan sarana prasarana, kegiatan kebersihan dan ketertiban;
n. Penyiapan rekomendasi perizinan di bidang pasar;
o. Pelaksanaan pembinaan kegiatan penataan pasar, analisis kebutuhan sarana prasarana pasar, pembinaan/sosialisasi kepada pedagang, serta upaya mewujudkan lingkungan pasar yang bersih, rapi, tertib, dan nyaman.

p. Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

q. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

r. Pelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

5. Nilai-Nilai Organisasi Instansi

1) Pelayanan Prima dan Akuntabilitas: Mengutamakan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Integritas dan Tata Kelola: Menegakkan etika kerja, kejujuran, serta membangun budaya antikorupsi demi tata kelola yang profesional.

3) Inovasi dan Digitalisasi: Mendorong pemanfaatan teknologi untuk menyederhanakan layanan, perizinan, promosi dagang, dan pengembangan industri.

4) Kolaborasi dan Kemitraan: Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, komunitas, maupun akademisi untuk meningkatkan daya saing UMKM.

5) Keberlanjutan dan Ketahanan Ekonomi: Mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan, efisiensi, serta mitigasi risiko sebagai dasar pertumbuhan ekonomi daerah jangka panjang.

B. Profil Peserta



Nama	:	Venisa Putri, S.Psi
NIP	:	200303312025052001
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sebukar, 31 Maret 2003
Jabatan	:	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
Instansi	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci
Email	:	venisaputri23@gmail.com

Tugas Pokok dan Fungsi:

Penulis memegang jabatan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama sesuai SK CPNS dan penetapan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun menurut Kepmenpan No. 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo KEP/04/M.PAN/1/2005 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, ruang lingkup tugas meliputi:

1. Melakukan Persiapan Penyuluhan
    - Mengidentifikasi potensi wilayah, sentra industri, dan kebutuhan penyuluhan.
    - Menyusun program, pedoman, atau rencana kerja penyuluhan.

2. Melaksanakan Penyuluhan
    - Menyusun materi penyuluhan yang sesuai kebutuhan pelaku usaha.
    - Memberikan bimbingan, pembinaan, dan konsultasi kepada pelaku industri dan perdagangan.
    - Mengembangkan serta menumbuhkan sektor industri dan perdagangan di wilayah binaan.
3. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan
    - Mengevaluasi hasil kegiatan penyuluhan.
    - Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyuluhan sebagai bahan pembinaan dan pengambilan kebijakan.
4. Mengembangkan Profesi
    1) Membuat karya tulis atau kajian di bidang perindustrian dan perdagangan.
    2) Mengikuti kegiatan ilmiah, temu profesi, atau pengembangan teknologi tepat guna.
5. Melaksanakan Kegiatan Penunjang
    - Mengikuti seminar, lokakarya, atau pelatihan terkait bidang industri dan perdagangan.
    - Menjadi anggota organisasi profesi atau tim penilai jabatan fungsional.
    - Memperoleh penghargaan atau sertifikasi yang mendukung kinerja penyuluhan.

BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Isu

1. Isu Ke-1: Belum Optimalnya Kepemilikan Legalitas Usaha Industri Kecil dan Menengah

a. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, ditemukan bahwa masih banyak pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang belum memiliki legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, dan izin edar BPOM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM) mengenai pentingnya legalitas usaha masih terbatas, serta adanya kendala teknis maupun administratif yang membuat proses pengurusan legalitas belum berjalan optimal.

b. Dampak

Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) akan menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha. Tanpa legalitas, produk industri kecil dan menengah (IKM) sulit masuk ke pasar modern atau *e-commerce* resmi, tidak dapat mengakses program bantuan maupun pembiayaan pemerintah, serta berpotensi menghadapi persoalan hukum terkait izin usaha dan perlindungan konsumen. Hal ini bukan

hanya merugikan pelaku industri kecil dan menengah (IKM), tetapi juga konsumen yang membutuhkan jaminan keamanan produk, serta pemerintah daerah yang kehilangan peluang peningkatan perekonomian lokal.

c. Keterkaitan dengan Agenda III

Isu ini terkait dengan Manajemen ASN, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan masyarakat. Selain itu, isu ini relevan dengan Smart ASN, karena menuntut ASN mampu memanfaatkan teknologi digital dalam penyebaran informasi, fasilitasi pengurusan, serta monitoring legalitas usaha.

2. Isu 2: Belum Optimalnya Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah melalui Katalog Digital

a. Kondisi Saat Ini

Promosi produk industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci hingga saat ini sebagian besar masih dilakukan secara konvensional, seperti mengikuti pameran atau melalui penjualan langsung. Hanya sebagian kecil pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang memanfaatkan media digital berupa katalog *online*, namun pemanfaatannya belum konsisten dan tidak terkelola dengan baik. Hal ini menyebabkan produk lokal sulit menjangkau konsumen di luar daerah, serta daya saingnya lebih rendah dibandingkan produk dari wilayah lain yang sudah mengoptimalkan pemasaran digital.

b. Dampak

Jika kondisi ini dibiarkan, maka produk industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Kerinci akan sulit dikenal di pasar yang lebih luas, sehingga daya saing produk lokal semakin lemah. Akibatnya, potensi peningkatan pendapatan pelaku usaha menjadi terbatas, konsumen tidak mendapatkan alternatif produk yang beragam, dan pemerintah daerah kehilangan peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM).

c. Keterkaitan dengan Agenda III

Isu ini sangat relevan dengan konsep *Smart* ASN, karena menuntut ASN untuk adaptif dan inovatif dalam mendukung transformasi digital, khususnya pada sektor pemasaran produk. Selain itu, promosi melalui katalog digital sejalan dengan Manajemen ASN, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

3. Isu 3: Rendahnya Pemahaman Industri Kecil dan Menengah dalam Berkomunikasi di Media Sosial

a. Kondisi Saat Ini

Sebagian besar pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci sebenarnya sudah memiliki akun media sosial untuk mempromosikan produk. Namun, pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan pemahaman dalam strategi komunikasi digital. Banyak pelaku industri kecil dan

menengah (IKM) yang belum memahami teknik promosi seperti *copywriting* sederhana, penggunaan bahasa promosi yang menarik, desain visual yang tepat, serta konsistensi unggahan konten. Akibatnya, akun media sosial kurang interaktif dan promosi yang dilakukan tidak mampu menarik perhatian konsumen.

b. Dampak

Jika isu ini tidak ditangani, maka pelaku industri kecil dan menengah (IKM) akan kesulitan memanfaatkan peluang pasar digital yang sebenarnya sangat besar. Produk lokal akan kalah bersaing dengan produk dari daerah lain yang lebih agresif memanfaatkan media sosial. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada stagnasi pendapatan usaha, terbatasnya jangkauan informasi produk ke konsumen, serta hilangnya kesempatan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor industri kecil dan menengah (IKM).

c. Keterkaitan dengan Agenda III

Isu ini berkaitan dengan *Smart* ASN, khususnya kemampuan ASN untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan digital marketing. Di sisi lain, isu ini juga selaras dengan Manajemen ASN, khususnya dalam hal pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar pelaku industri kecil dan menengah (IKM) mampu memanfaatkan media sosial secara lebih efektif, mandiri, dan berdaya saing.

B. Analisis *Core* Isu

Sebelum melaksanakan aktualisasi, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di unit kerja. Berdasarkan hasil observasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan pengembangan industri kecil dan menengah. Agar isu yang dipilih benar-benar relevan dan sesuai dengan prioritas untuk diselesaikan, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak). Metode ini digunakan untuk menentukan isu mana yang lebih penting dan lebih didahulukan untuk kemudian dicari solusinya.

Aktual, artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Problematik, artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Kekhalayakan, artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak, artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1 – 5, yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya.

Berikut ini adalah hasil penilaian terhadap tiga isu utama yang telah diidentifikasi, yaitu :

Tabel 3.1 Analisis dengan Metode APKL

No	Isu	Kriteria				TOTAL	RANGKING
		A	P	K	L		
1	Belum optimalnya kepemilikan legalitas usaha	5	5	5	5	20	1
2	Belum optimalnya promosi produk industri kecil dan menengah (katalog digital)	4	4	4	5	17	2
3	Rendahnya pemahaman industri kecil dan menengah soal komunikasi di media sosial	4	4	3	4	15	3

Adapun kriteria penetapan indikator APKL, yaitu:

Aktual :

1 : Benar-benar terjadi

2 : Benar-benar sering terjadi

3 : Benar-benar terjadi dan bukan menjadi pembicaraan

4 : Benar-benar terjadi terkadang menjadi bahan pembicaraan

5 : Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan

Problematik :

1 : Masalah sederhana

2 : Masalah kurang kompleks

3 : Masalah cukup kompleks namun tidak perlu segara dicarikan Solusi

4 : Masalah kompelks

5 : Masalah sangat kompleks sehingga perlu dicarikan segara solusinya

Kekhalayakan :

1 : Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak

2 : Sedikit menyangkut hajat hidup orang banyak

3 : Cukup menyangkut hajat hidup orang banyak

4 : Menyangkut hajat hidup orang banyak

5 : Sangat menyangkut hajat hidup orang banyak

Layak :

1: Masuk akal

2: Realistis

3: Cukup masuk akal dan realistis

4: Masuk akal dan dan realistis

5: Masuk akal, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya

Setelah ditetapkan isu prioritas dengan menggunakan metode APKL, yaitu “Belum Optimalnya Kepemilikan Legalitas Usaha”, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab dari isu tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*).

Tabel 3.2 Analisis dengan Metode USG

No	Penyebab Isu	Kriteria			TOTAL	RANGKING
		U	S	G		
1	Terbatasnya pendampingan dan informasi teknis dari instansi terkait	4	5	4	13	2
2	Rendahnya pemahaman pelaku industri kecil dan menengah tentang pentingnya legalitas usaha	5	5	5	15	1
3	Keterbatasan akses digital bagi pelaku industri kecil dan menengah	4	4	4	12	3

Adapun kriteria penetapan indikator APKL, yaitu:

Urgency:

5: Sangat Mendesak

4: Mendesak

3: Cukup Mendesak

2: Kurang Mendesak

1: Tidak Mendesak

Seriousness:

5: Sangat Serius

4: Serius

3: Cukup Serius

2: Kurang Serius

1: Tidak Serius

Growth:

5: Sangat Cepat Memburuk

4: Cepat Memburuk

3: Cukup Cepat Memburuk

2: Kurang Cepat Memburuk

1: Tidak Cepat Memburuk

Berdasarkan hasil analisis penyebab isu menggunakan metode USG, maka diperoleh penyebab utama dari belum optimalnya kepemilikan legalitas usaha adalah rendahnya pemahaman pelaku industri kecil dan menengah tentang pentingnya legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman merupakan kunci untuk mendorong pelaku industri kecil dan menengah mengurus legalitas usahanya.

C. Rumusan Isu

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis menggunakan metode APKL dan USG terhadap kondisi yang terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, ditemukan bahwa pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM) terhadap pentingnya legalitas usaha masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang belum memiliki izin usaha maupun belum memahami manfaat legalitas dalam menunjang keberlanjutan usahanya. Akibatnya, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sering mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya. Maka rumusan isu dalam upaya penyelesaian *core* isu adalah: “Bagaimana Meiningkatkan Pemahaman Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Terkait Pentingnya Legalitas Usaha di Kabupaten Kerinci?”

D. Gagasan Kreatif Penyelesaian *Core* Isu

Dengan merujuk pada akar penyebab yang telah dianalisis melalui metode APKL dan USG maka gagasan kreatif yang dipilih untuk menyelesaikan core isu adalah: **"Pembuatan Video Edukasi untuk Meningkatkan Pemahaman Terkait Legalitas Usaha pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci."**

Gagasan ini dipilih karena pembuatan video edukasi bersifat sederhana, mudah diakses, hemat biaya, dan dapat menjangkau banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sekaligus tanpa harus melakukan pendampingan tatap muka satu per satu yang membutuhkan waktu serta sumber daya besar. Video edukasi ini akan berisi penjelasan singkat mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat yang diperoleh jika pelaku industri kecil dan menengah (IKM) memiliki legalitas (seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, maupun izin edar BPOM), serta motivasi agar pelaku IKM segera mengurus legalitas sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Melalui media video, pelaku IKM dapat memutar kembali materi edukasi kapan saja, sehingga pemahaman dapat terus ditingkatkan. Selain itu, video ini juga bisa dibagikan secara digital melalui media sosial, WhatsApp group, atau disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Keterkaitan dengan Agenda III

Gagasan ini sangat relevan dengan Agenda III Latsar CPNS. Dalam perspektif Manajemen ASN, pembuatan video edukasi mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada aspek edukasi dan

pembinaan masyarakat agar lebih memahami pentingnya legalitas usaha. Sementara dalam perspektif *Smart* ASN, penggunaan media digital berupa video merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, inovasi dalam penyampaian informasi, serta dukungan terhadap transformasi digital pelayanan publik.

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut

1. Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor.
2. Membuat video edukasi tentang pentingnya legalitas usaha.
3. Mempublikasikan video edukasi.
4. Melakukan evaluasi pemahaman pada pelaku industri kecil dan menengah (IKM).
5. Membuat laporan hasil aktualisasi.

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa penyesuaian waktu dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan lebih sinkron dengan waktu aktualisasi yang sebenarnya dan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Semula, kegiatan melakukan konsultasi gagasan dengan mentor direncanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan Agustus. Namun, karena masa pelaksanaan aktualisasi baru dimulai pada bulan September, kegiatan tersebut akhirnya dilaksanakan pada minggu pertama bulan September. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap jadwal kegiatan selanjutnya. Kegiatan pembuatan video edukasi yang semula dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua bulan September, mengalami pergeseran menjadi minggu kedua bulan September. Begitu pula dengan kegiatan publikasi video edukasi yang awalnya direncanakan pada minggu kedua, kemudian disesuaikan menjadi minggu ketiga bulan September agar urutannya lebih selaras dengan tahap produksi video.

Kegiatan evaluasi pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM) juga mengalami penyesuaian waktu. Semula direncanakan pada minggu ketiga, namun pelaksanaannya bergeser menjadi minggu keempat bulan September setelah publikasi video selesai dilakukan. Sementara itu, kegiatan terakhir yaitu penyusunan laporan hasil aktualisasi yang semula direncanakan hanya berlangsung pada minggu pertama bulan Oktober,

diperpanjang hingga dua minggu (minggu pertama dan kedua bulan Oktober) agar proses penyusunan laporan dan finalisasi dokumen dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Penyesuaian waktu ini tidak mengubah substansi kegiatan maupun capaian yang ingin dicapai, melainkan dilakukan agar seluruh tahapan pelaksanaan berjalan secara sistematis dan realistis. Berikut jadwal kegiatan aktualisasi setelah dilakukan penyesuaian waktu:

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	September				Oktober	
		I	II	III	IV	I	II
1	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor.						
2	Membuat video edukasi tentang pentingnya legalitas usaha.						
3	Mempublikasikan video edukasi.						
4	Melakukan evaluasi pemahaman pada pelaku industri kecil dan menengah (IKM).						
5	Membuat laporan hasil aktualisasi.						

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci

Identifikasi Isu :
1. Terbatasnya Pendampingan dan Informasi Teknis dari Instansi Terkait
2. Rendahnya Pemahaman Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) tentang Pentingnya Legalitas Usaha
3. Terbatasnya Akses Digital bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Isu yang Diangkat : Rendahnya Pemahaman Pelaku Industri Kecil dan Menengah tentang Pentingnya Legalitas Usaha

Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan Video Edukasi untuk Meningkatkan Pemahaman Terkait Legalitas Usaha pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci

Tabel 4. 2 Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor	1. Membuat surat telaah staf kepada mentor	1. Tersedianya draft surat telaah staf	**Kompeten:** saya telah membuat draft konsultasi sesuai dengan format yang diatur **Akuntabel:** saya telah memastikan isi surat sesuai aturan	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				tata naskah dinas. **Berorientasi Pelayanan:** saya telah menyusun isi surat dengan tujuan agar bermanfaat bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). **Adaptif:** saya telah menyesuaikan format dan isi surat dengan regulasi terbaru.				
		2. Melakukan konsultasi dengan mentor	2. Tersedianya catatan hasil konsultasi	**Kompeten:** saya telah menyampaikan gagasan aktualisasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Loyal: saya telah mengikuti arahan dan bimbingan mentor. **Akuntabel:** saya telah menjelaskan rencana kegiatan secara transparan kepada mentor. **Harmonis:** saya telah menjaga komunikasi yang baik dengan mentor dalam menyampaikan gagasan. **Berorientasi Pelayanan:** saya telah menyampaikan tujuan agar kegiatan benar-benar bermanfaat.				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Adaptif: saya telah menerima dan menyesuaikan gagasan sesuai saran mentor. **Kolaboratif:** saya telah menjalin kerja sama yang baik dengan mentor dalam proses konsultasi				
		3. Meminta persetujuan kepada mentor terkait pelaksanaan aktualisasi	3. Tersedianya surat telaah staf yang disetujui oleh mentor. Hasil: disetujuinya rencana	**Akuntabel:** saya telah bertanggung jawab penuh atas setiap langkah yang saya lakukan. **Loyal:** saya telah menaati arahan mentor sebelum meminta tanda tangan.	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
			aktualisasi oleh mentor dengan membubuhi tanda tangan	**Harmonis:** saya telah menjaga etika saat menyerahkan dokumen. **Berorientasi Pelayanan:** saya telah menjelaskan kembali tujuan kegiatan agar memberi manfaat nyata. **Kolaboratif:** saya telah membangun kerja sama yang baik dengan mentor dalam proses persetujuan,				
2	Membuat video edukasi tentang	1. Mengidentifikasi materi	1. Tersedianya materi dan konsep yang	**Kompeten:** saya telah mengidentifikasi materi legalitas usaha yang sesuai dengan	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	pentingnya legalitas usaha	terkait pentingnya legalitas usaha bagi industri kecil dan menengah (IKM) dan membuat konsep video serta mengkonsultasikannya kepada mentor	telah diidentifikasi.	kebutuhan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). **Berorientasi Pelayanan:** saya telah menyusun konsep video dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. **Adaptif:** saya telah menyesuaikan konsep video dengan kondisi dan karakteristik pelaku industri kecil dan menengah (IKM). **Akuntabel:** saya telah memastikan materi yang dipilih				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. **Loyal:** saya telah menyesuaikan konsep video agar selaras dengan identitas instansi. **Kolaboratif:** saya telah melibatkan mentor untuk memberikan masukan terhadap kesesuaian materi dan konsep video agar hasilnya lebih efektif.				
		2. Menyusun naskah	2. Tersedianya naskah dan	**Kompeten:** saya telah menyusun naskah narasi yang	Rekan Kerja			

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		dan visual pendukung video	visual pendukung video	runtut dan sesuai dengan konsep video. **Berorientasi Pelayanan:** saya telah menambahkan ilustrasi atau visual pendukung agar pesan lebih mudah dipahami. **Adaptif:** saya telah memanfaatkan aplikasi sederhana untuk mendesain visual pendukung video. **Kolaboratif:** saya telah meminta masukan dari rekan				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				agar naskah dan visual lebih efektif.				
		3. Membuat konten video edukasi	3. Tersedianya video edukasi. Hasil: video edukasi yang telah diedit	**Kompeten:** saya telah menggabungkan naskah dan visual menjadi konten video yang menarik. **Adaptif:** saya telah menggunakan aplikasi editing sederhana sesuai kemampuan dan fasilitas yang tersedia. **Akuntabel:** saya telah memastikan isi video sesuai dengan materi yang telah diidentifikasi.				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Berorientasi Pelayanan: saya telah menghasilkan video yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM). **Loyal:** saya telah menambahkan logo instansi untuk menjaga citra organisasi.				
3	Mempublikasikan video edukasi	1. Mengkoordinasikan hasil editing video	1. Tersedianya video yang telah disetujui mentor	**Berorientasi Pelayanan:** saya telah memastikan konten benar-benar bermanfaat bagi industri kecil dan	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		kepada mentor		menengah (IKM). **Akuntabel:** saya telah menindaklanjuti arahan revisi dengan transparan. **Harmonis:** saya telah menjaga komunikasi baik saat koordinasi publikasi dengan instansi. **Kompeten:** saya telah menyesuaikan video produk industri kecil dan menengah (IKM) ke dalam alur narasi. **Adaptif :** saya telah melakukan				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				perbaikan apabila terdapat koreksi dari mentor **Kolaboratif:** saya telah berdiskusi dengan rekan kerja dan mentor untuk memastikan hasil video sesuai standar publikasi.				
		2. Mempublikasikan video melalui media sosial instansi.	2. Tersedianya video yang telah dipublikasikan di media sosial instansi	**Berorientasi Pelayanan:** saya telah membuat caption singkat agar mudah dipahami. **Akuntabel:** saya telah memastikan konten sesuai persetujuan. **Kompeten:** saya	Pengelola Akun Media Sosial Instansi	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				telah menyesuaikan format video agar kualitas terjaga. **Kolaboratif:** saya telah bekerja sama dengan pengelola media sosial instansi untuk menyebarkan video. **Adaptif:** saya telah memanfaatkan media sosial instansi untuk publikasi. **Loyal:** saya telah mengikuti prosedur instansi dalam publikasi video.				
		3. Membagikan video	3. Tersedianya video yang	**Harmonis:** saya telah menjaga komunikasi yang baik	Pelaku IKM	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		ke grup WhatsApp IKM.	telah dibagikan ke grup WhatsApp IKM. Hasil: video yang telah dipublikasikan di media sosial dan telah dibagikan ke grup WA IKM	dengan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) **Berorientasi Pelayanan:** saya telah memastikan video dapat diakses dengan mudah oleh pelaku IKM. **Kompeten:** saya telah menyesuaikan bahasa pengantar agar sederhana. **Adaptif:** saya telah memanfaatkan WhatsApp dalam menyebarkan video.				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
4	Melakukan evaluasi pemahaman pada pelaku IKM	1. Menyusun kuesioner menggunakan *google form* untuk mengukur pemahaman pelaku IKM, serta mengkonsultasikannya kepada mentor	1. Tersedianya kuesioner berupa *google form* yang telah disetujui oleh mentor	**Kompeten:** saya telah menyusun instrumen evaluasi sesuai dengan materi. **Akuntabel:** saya telah memastikan instrumen evaluasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat ukur pemahaman. **Adaptif:** saya telah menggunakan fitur Google Form untuk membuat kuesioner. **Loyal:** saya telah mencantumkan identitas dinas sebagai bentuk	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				menjaga nama baik instansi. **Kolaboratif:** saya telah mendiskusikan isi kuesioner dengan mentor agar sesuai dengan tujuan evaluasi.				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		2. Menyebarkan kuesioner berupa *google form* kepada pelaku IKM	2. Tersedianya kuesioner berupa *google form* yang telah dibagikan	**Berorientasi Pelayanan:** saya telah menyebarkan instrumen evaluasi dengan cara yang mudah diakses pelaku industri kecil dan menengah (IKM). **Harmonis:** saya telah menjaga komunikasi yang baik saat meminta partisipasi dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM). **Adaptif:** saya telah memanfaatkan WhatsApp untuk menyebarkan kuesioner.	Pelaku IKM	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		3. Menganalisis hasil evaluasi & membuat laporan	3. Tersedianya laporan hasil evaluasi pemahaman pelakuIKM Hasil: kuesioner yang telah diisi oleh pelaku IKM	**Kompeten:** saya telah menganalisis data dengan teliti. **Adaptif:** saya telah memanfaatkan Google Spreadsheet untuk mengolah data. **Akuntabel:** saya telah melaporkan hasil evaluasi secara transparan dan jujur. **Berorientasi Pelayanan:** saya telah memastikan hasil evaluasi menunjukkan dampak nyata dari kegiatan video edukasi ini.				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
5	Membuat laporan hasil aktualisasi	1. Menyusun laporan aktualisasi	1. Tersedianya laporan aktualisasi	**Kompeten:** saya telah menyusun laporan sesuai sistematika dan pedoman yang berlaku. **Akuntabel:** saya telah memastikan isi laporan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kegiatan. **Berorientasi Pelayanan:** saya telah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar laporan bermanfaat bagi instansi.				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Adaptif: saya telah menyesuaikan isi laporan dengan format resmi dan segera merevisi bila ada bagian yang kurang tepat. **Loyal:** saya telah mematuhi aturan dan kebijakan instansi dalam penyusunan laporan.				
		2. Mengkonsultasikan laporan aktualisasi dengan mentor	2. Tersedianya catatan hasil konsultasi laporan	**Harmonis:** saya telah menjaga komunikasi yang baik dan menghargai pendapat mentor. **Kompeten:** saya telah menyiapkan bahan konsultasi	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				dengan jelas agar mudah dipahami. **Loyal:** saya telah mengikuti arahan mentor dalam penyempurnaan laporan. **Akuntabel:** saya telah menyampaikan laporan sesuai fakta kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. **Kolaboratif:** saya telah menjalin kerja sama yang baik dengan mentor dalam proses konsultasi laporan akhir				

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		3. Memfinalisasikan laporan aktualisasi	3. Tersedianya laporan hasil aktualisasi yang dibubuhi tanda tangan mentor. Hasil : laporan aktualisasi yang disetujui mentor	**Akuntabel:** saya telah memastikan laporan final sesuai fakta kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan. **Kompeten:** saya telah menyelesaikan laporan dengan teliti agar tidak ada kesalahan. **Berorientasi Pelayanan:** saya telah menghasilkan laporan yang berkualitas sebagai bukti pelaksanaan aktualisasi.	Mentor	Tidak		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan (Ber-AKHLAK)	Pihak-Pihak yang Terkait	Potensi Konflik (Ya / Tidak)	Solusi Jika Ada Konflik	Keterangan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Adaptif: saya telah menyesuaikan format laporan dengan masukan dari mentor dan ketentuan yang berlaku. **Loyal:** saya telah menuntaskan laporan hingga sah ditandatangani mentor sebagai bukti komitmen menjaga nama baik instansi.				

C. Matrik Rekapitulisasi Realisasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS (BerAKHLAK)

Adapun rekapitulisasi rencana habituasi nilai-nilai dasar PNS (BerAKHLAK) yang akan dilaksanakan dicantumkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Rekapitulisasi Realisasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar PNS (BerAKHLAK)

No	Mata Pelatihan	Kegiatan										Jumlah Aktualisasi per MP	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Berorientasi Pelayanan	-	3	3	3	1	3	2	2	2	2	8	13
2	Akuntabel	2	3	2	2	-	2	2	2	2	3	8	12
3	Kompeten	2	2	3	3	-	3	1	2	3	3	9	13
4	Harmonis	1	2	-	1	2	3	1	1	1	1	5	8
5	Loyal	1	2	-	1	1	1	-	2	2	3	4	9
6	Adaptif	-	2	3	3	2	3	-	3	1	2	6	13
7	Kolaboratif	-	2	1	2	1	2	-	1	-	1	2	8
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan		6	16	12	15	7	17	6	13	11	15	42	76

D. Capaian Penyelesaian *Core* Isu

Berikut penjelasancapaian penyelesaian *core* isu sebelum dan sesudah dilakukannya aktualisasi.

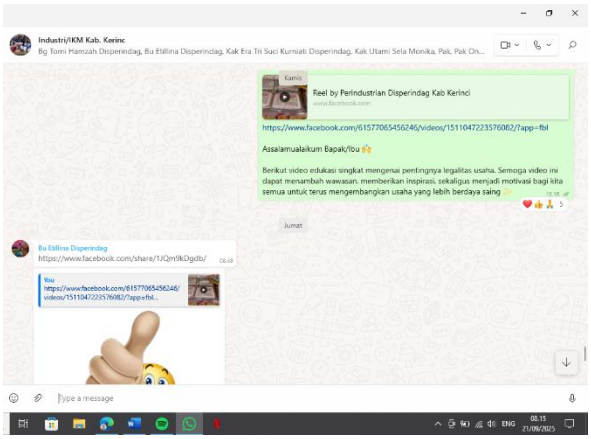
Tabel 4. 4 Kondisi *Core* Isu

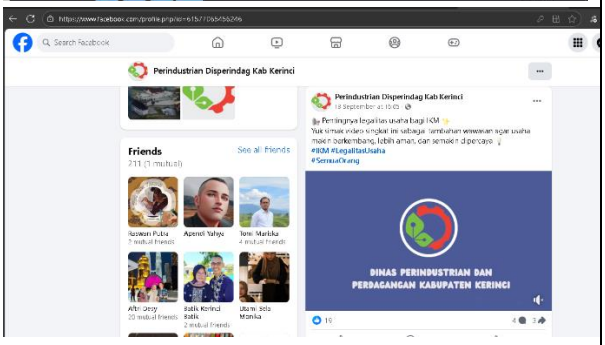
Kondisi *Core* Isu	
Sebelum Aktualisasi	**Sesudah Aktualisasi**
Sebelum pelaksanaan aktualisasi, penyampaian informasi terkait legalitas usaha kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) masih dilakukan secara lisan dalam kegiatan pembinaan perorangan. Materi yang disampaikan terbatas pada penjelasan langsung tanpa adanya media pendukung, sehingga informasi seringkali tidak tersampaikan secara utuh dan mudah terlupakan oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM).  Kemudian untuk penyampaian informasi mengenai legalitas	Setelah pelaksanaan aktualisasi, penyampaian informasi dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan terstruktur melalui pembuatan video edukasi tentang legalitas usaha. Video ini menjelaskan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Dengan adanya media ini, pelaku IKM industri kecil dan menengah (IKM) memahami materi tanpa harus hadir langsung di kegiatan pembinaan.  Kemudian, setelah pelaksanaan aktualisasi, keterjangkauan informasi meningkat secara signifikan melalui penyebaran video edukasi tentang legalitas usaha yang dilakukan secara daring. Melalui media digital seperti Facebook instansi dan WhatsApp Group IKM, video tersebut dapat diakses oleh seluruh pelaku IKM tanpa terbatas jarak dan waktu. Cara ini membuat proses penyebaran informasi menjadi lebih efisien, praktis, dan inklusif karena mampu menjangkau pelaku IKM yang

usaha biasanya dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi tempat usaha pelaku IKM satu per satu. Pola pembinaan seperti ini membuat jangkauan informasi menjadi terbatas karena petugas hanya mampu mengunjungi beberapa pelaku IKM dalam satu waktu. Akibatnya, banyak pelaku yang belum mendapatkan pemahaman memadai tentang prosedur pengurusan legalitas usaha, terutama bagi mereka yang lokasinya jauh atau belum sempat dikunjungi.

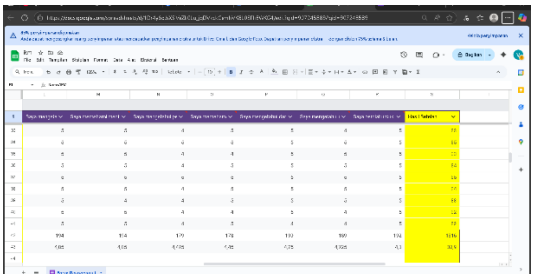


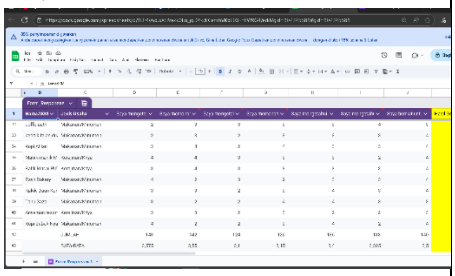
Selanjutnya, hasil dari kuesioner yang menggunakan metode *retrospective pretest–posttest* untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku IKM sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi menunjukkan bahwa banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang belum memahami pentingnya legalitas usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum menonton video nilai rata-rata sebelumnya sulit dijangkau melalui kunjungan langsung.





Setelah pelaksanaan aktualisasi, pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas usaha mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuesioner dengan menggunakan metode *retrospective pretest–posttest.* Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada nilai rata-rata terkait pemahaman pentingnya legalitas usaha pada pelaku industri kecil dan menengah dari 23,6 naik menjadi 32,9.



pemahaman merekan hanya 23,6. 	

E. Manfaat Terselesaikannya *Core* Isu

1) Individu Peserta

Terselesaikannya *core* isu memberikan manfaat yang sangat besar bagi individu peserta, khususnya dalam proses pembelajaran sebagai calon ASN yang harus mampu menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK. Melalui kegiatan aktualisasi ini, peserta belajar untuk benar-benar memahami masalah nyata yang dihadapi masyarakat, yaitu rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha, kemudian merumuskan solusi sederhana namun tepat sasaran dalam bentuk video edukasi. Proses ini membuat peserta tidak hanya menguasai aspek teknis pembuatan media, tetapi juga terlatih berpikir kreatif, adaptif, dan inovatif dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dengan melakukan evaluasi menggunakan instrumen kuantitatif, peserta juga memperoleh pengalaman langsung bagaimana cara mengukur efektivitas sebuah intervensi. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM) secara nyata. Bagi peserta, hal

ini menjadi pembelajaran berharga bahwa seorang ASN tidak cukup hanya menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata dan terukur. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh individu peserta tidak hanya peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga penguatan integritas, akuntabilitas, serta orientasi pelayanan yang berfokus pada masyarakat.

2) Instansi

Manfaat yang diperoleh instansi, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, juga tidak kalah penting. Kegiatan aktualisasi ini menghasilkan produk berupa video edukasi yang bisa menjadi salah satu sarana sosialisasi resmi instansi. Jika sebelumnya penyuluhan mengenai legalitas usaha lebih banyak dilakukan secara tatap muka dengan keterbatasan jumlah peserta, maka kini instansi memiliki media digital yang bisa digunakan berulang kali tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Video ini dapat disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi seperti WhatsApp grup, media sosial, atau diputar pada kegiatan pelatihan, sehingga memperluas jangkauan sosialisasi dengan cara yang lebih efisien.

Selain menambah variasi metode sosialisasi, manfaat lain bagi instansi adalah meningkatnya citra sebagai lembaga pemerintah yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya inovasi berupa pemanfaatan media digital, instansi dapat menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak harus selalu kaku dan formal, tetapi bisa dikemas dengan cara yang sederhana dan menarik. Hal ini selaras

dengan tuntutan zaman, di mana masyarakat semakin terbiasa mengakses informasi secara digital. Bagi Disperindag Kerinci, hasil aktualisasi ini juga mendukung tujuan strategis instansi dalam meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui pendampingan dan fasilitasi yang berkesinambungan.

3) *Stakeholders*

Bagi *stakeholders*, khususnya pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dan masyarakat luas, manfaat dari terselesaikannya *core* isu dirasakan secara langsung. Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) kini memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa itu legalitas usaha, bagaimana cara mengurusnya, serta manfaat yang bisa diperoleh. Hasil evaluasi membuktikan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan mereka, misalnya pemahaman perbedaan izin edar BPOM dan SPP-IRT, atau pemahaman tentang risiko menjalankan usaha tanpa legalitas resmi. Peningkatan pemahaman ini diharapkan akan mendorong mereka untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengurus izin usaha, sehingga dapat membuka akses yang lebih luas terhadap program pembinaan, bantuan permodalan, maupun peluang pemasaran di pasar modern.

Manfaat lain yang dirasakan *stakeholder* adalah meningkatnya motivasi dan kesadaran kolektif di kalangan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Jika sebelumnya banyak yang merasa bahwa usaha bisa berjalan tanpa izin, kini muncul sikap baru yang lebih positif, ditandai dengan skor niat mengurus legalitas yang meningkat signifikan dari 3,50 menjadi 4,80. Perubahan sikap ini tentu menjadi modal penting untuk

memperbaiki kondisi usaha industri kecil dan menengah (IKM) di Kerinci secara jangka panjang. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen juga akan mendapat manfaat tidak langsung. Dengan semakin banyak produk industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki legalitas resmi, kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasaran akan lebih terjamin. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Setelah melaksanakan aktualisasi ini, saya menyadari bawa masih banyak sekali kekurangn dalam pelaksanaannya. Masih terdapat banyak celah yang dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi. Adapun rencana tindak lanjut dari hasil aktualisasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No	Kegiatan	Output	Durasi dan Waktu	Parapihak Terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
1.	Pengembangan seri lanjutan video edukasi yang berfokus pada prosedur teknis pengurusan legalitas (NIB, SPP-IRT, sertifikasi halal, izin edar BPOM)	Video edukasi teknis	3–6 bulan (setelah aktualisasi)	Peserta, mentor, tim teknis Disperindag	-	Sebagai tindak lanjut dari video awal yang bersifat umum
2.	Pengelolaan akun media sosial Disperindag	Kalender konten dan	Berkelanjutan (setiap bulan)	Admin media sosial Disperinda	-	Untuk menjaga kesinambungan

	secara rutin dengan konten edukatif singkat (tips, infografis, mini video) tentang legalitas usaha IKM	laporan publikasi rutin		g, Bidang Industri		edukasi digital dan membangun kedekatan instansi dengan pelaku IKM melalui pendekatan online yang adaptif dan komunikatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Aktualisasi/Habituasi Mata Pelatihan

a) Kegiatan Ke-1 : Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor.

Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menyusun dan mengonsultasikan gagasan aktualisasi kepada mentor. Sebelum konsultasi, saya membuat surat telaah staf dengan jujur dan menyesuaikan format resmi instansi sebagai bentuk penerapan nilai Akuntabel. Saya juga berusaha Kompeten dengan menyusun ide berdasarkan hasil observasi lapangan dan analisis permasalahan yang benar-benar terjadi pada pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Dalam proses konsultasi, saya menjaga komunikasi yang sopan dan menghargai setiap masukan dari mentor sebagai wujud nilai Harmonis. Saya menyesuaikan isi gagasan sesuai dengan saran mentor agar lebih realistis dan tepat sasaran, yang menunjukkan sikap Adaptif. Semua langkah tersebut saya lakukan dengan semangat Berorientasi Pelayanan, karena tujuan akhir kegiatan ini adalah membantu pelaku industri kecil dan menengah (IKM) memahami pentingnya legalitas usaha. Selain itu, saya menunjukkan Loyalitas dengan menaati arahan mentor serta mengikuti prosedur yang berlaku di instansi agar rencana kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan.

b) **Kegiatan Ke-2 : Membuat video edukasi tentang pentingnya legalitas usaha.**

Kegiatan kedua ini merupakan inti dari pelaksanaan aktualisasi, yaitu membuat video edukasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Dalam proses ini, saya menunjukkan nilai Kompeten dengan menyusun konsep, naskah, dan visual secara sistematis agar mudah dipahami oleh masyarakat. Saya memastikan seluruh materi berasal dari sumber resmi dan sesuai regulasi sebagai bentuk Akuntabel. Selama pembuatan video, saya bekerja sama dengan rekan kerja untuk meminta masukan dan menyempurnakan hasil editing, mencerminkan nilai Harmonis dan Kolaboratif. Saya juga bersikap Adaptif dengan memanfaatkan aplikasi sederhana yang tersedia untuk menghasilkan video yang menarik. Video ini saya rancang agar informatif, ringkas, dan mudah diakses sehingga benar-benar Berorientasi Pelayanan terhadap kebutuhan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Selain itu, saya menambahkan logo instansi di dalam video sebagai bentuk Loyalitas dan kebanggaan terhadap organisasi tempat saya bekerja.

c) **Kegiatan Ke-3 : Mempublikasikan video edukasi.**

Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah mempublikasikan video edukasi yang telah selesai melalui media sosial instansi dan grup WhatsApp pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Sebelum dipublikasikan, saya terlebih dahulu berkoordinasi dengan mentor untuk memastikan isi video sesuai dengan kebijakan instansi sebagai

wujud Akuntabel. Saya menyesuaikan strategi publikasi agar konten bisa menjangkau lebih banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM), menunjukkan sikap Kompeten dan Adaptif. Dalam proses ini, saya menjalin komunikasi yang baik dengan pengelola media sosial serta menjaga sopan santun dan kerja sama yang Harmonis. Publikasi ini saya lakukan dengan semangat Berorientasi Pelayanan, agar informasi penting tentang legalitas usaha dapat tersampaikan dengan mudah kepada masyarakat. Saya juga menunjukkan Loyalitas dengan menjaga citra positif instansi melalui konten yang bermanfaat, serta Kolaboratif karena melibatkan mentor dan rekan kerja agar proses publikasi berjalan dengan lancar dan profesional.

d) Kegiatan Ke-4 : Melakukan evaluasi pemahaman pada pelaku IKM.

Kegiatan keempat ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas video edukasi dalam meningkatkan pemahaman pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Saya menyusun instrumen evaluasi menggunakan Google Form dengan cermat dan objektif sebagai wujud Kompeten dan Akuntabel. Saya memanfaatkan teknologi digital untuk pengumpulan dan pengolahan data, mencerminkan sikap Adaptif terhadap perkembangan kerja modern. Dalam proses penyebaran kuesioner, saya menjaga komunikasi sopan dengan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dan menghargai semua tanggapan yang diberikan, menunjukkan nilai Harmonis. Saya menganalisis hasil secara transparan dan jujur, serta menggunakan data tersebut untuk memperbaiki kualitas kegiatan pembinaan berikutnya, mencerminkan

nilai Berorientasi Pelayanan. Kegiatan ini juga memperlihatkan Loyalitas saya terhadap instansi karena hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pengembangan ke depan, serta Kolaboratif karena melibatkan mentor dan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam keseluruhan proses.

e) Kegiatan Ke-5 : Membuat laporan hasil aktualisasi.

Kegiatan terakhir yang saya lakukan adalah menyusun laporan hasil aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam tahap ini, saya menerapkan nilai Kompeten dengan menyusun laporan sesuai pedoman dan menyajikan seluruh hasil kegiatan secara runtut dan sistematis. Saya memastikan seluruh isi laporan dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan, menunjukkan nilai Akuntabel. Saya juga menggunakan bahasa yang jelas dan sopan agar laporan mudah dipahami dan memberi manfaat bagi instansi, mencerminkan Berorientasi Pelayanan serta sikap Harmonis terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selama proses penyusunan, saya menyesuaikan isi dan format laporan sesuai pedoman resmi serta melakukan revisi jika dibutuhkan, menandakan Adaptif. Laporan ini saya selesaikan dengan penuh tanggung jawab hingga mendapatkan persetujuan mentor, sebagai bentuk Loyalitas terhadap instansi dan dedikasi terhadap tugas yang telah diamanahkan.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian *Core* Isu

Berdasarkan persetujuan mentor dan *coach* terhadap masalah yang diangkat sesuai dengan tugas pokok pada unit kerja saya, maka perancangan aktualisasi ini difokuskan pada isu mengenai rendahnya pemahaman pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap legalitas usaha. Isu ini dipandang relevan karena secara langsung berkaitan dengan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci, yaitu memberikan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Setelah melalui tahapan konsultasi, perancangan, hingga seminar di hadapan evaluator, *coach*, dan mentor, isu ini kemudian ditetapkan untuk dilanjutkan ke tahap pelaksanaan aktualisasi dan habituasi.

Jika melihat fenomena yang terjadi di lapangan, sebagian besar pelaku industri kecil dan menengah (IKM) masih belum memahami dengan baik apa itu legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikasi halal, maupun izin edar BPOM. Informasi yang mereka miliki sering kali hanya sebatas “pernah dengar”, tanpa mengetahui prosedur dan manfaatnya secara lebih jelas. Kondisi ini menyebabkan usaha mereka berjalan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga sulit menembus pasar modern, terbatas dalam mendapatkan dukungan program pemerintah, dan rentan menghadapi risiko usaha. Situasi ini memperlihatkan bahwa aspek legalitas yang seharusnya menjadi fondasi justru masih diabaikan.

Melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu mengangkat isu ini dan mencoba memberikan solusi yang sederhana namun efektif. Gagasan kreatif yang ditawarkan adalah pembuatan media edukasi berupa video yang berisi penjelasan tentang pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan izin, serta informasi singkat mengenai prosedur pengurusannya. Video dipilih karena memiliki beberapa keunggulan: dapat disajikan dengan cara menarik, mudah dipahami, bisa diputar ulang kapan saja, dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) melalui distribusi digital. Dengan adanya media ini, diharapkan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) tidak lagi merasa bahwa legalitas usaha adalah hal yang rumit dan jauh dari jangkauan mereka.

Untuk menyampaikan gagasan ini, saya menyusun video dengan tampilan yang sederhana namun informatif, menyesuaikan dengan karakteristik pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang beragam. Prosesnya diawali dengan identifikasi materi, konsultasi dengan mentor, pembuatan storyboard, editing, hingga akhirnya video siap dipublikasikan. Distribusi dilakukan melalui grup WhatsApp pelaku industri kecil dan menengah (IKM), sehingga media ini dapat diakses secara fleksibel. Selain itu, saya juga melakukan evaluasi menggunakan kuesioner *retrospective pretest-posttest* untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pemahaman mereka. Dengan mengangkat isu legalitas usaha dan menyelesaikannya melalui media digital, saya berusaha menunjukkan bahwa peran ASN

tidak hanya sebatas menjalankan aturan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi inovatif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Capaian Hasil Penyelesaian *Core* Isu

Setelah pelaksanaan kegiatan aktualisasi "Peningkatan Pemahaman Pelaku IKM terhadap Legalitas Usaha melalui Video Edukasi" selesai dilakukan, maka terdapat beberapa capaian hasil penyelesaian core isu sebagai berikut:

a. Peningkatan pemahaman pelaku IKM mengenai legalitas usaha.

Hal ini dibuktikan dari hasil survei evaluasi yang menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman pada seluruh aspek yang diukur, yaitu dari rentang 3,10–3,57 sebelum kegiatan menjadi 4,45–4,85 setelah kegiatan. Indikator yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah pemahaman mengenai risiko menjalankan usaha tanpa legalitas (+1,40 poin) dan perbedaan izin edar BPOM dengan SPP-IRT (+1,37 poin). Data ini menunjukkan bahwa video edukasi yang dibuat efektif dalam memberikan pemahaman baru sekaligus memperkuat pengetahuan yang sebelumnya belum jelas dipahami pelaku IKM.

b. Tersedianya media edukasi berupa video yang praktis, informatif, dan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Video ini dapat diputar ulang kapan saja oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM), baik secara individu maupun dalam forum pelatihan. Keberadaan video menjadi bentuk solusi nyata atas

keterbatasan sosialisasi tatap muka yang selama ini hanya bersifat formal dan terbatas pada jumlah peserta. Dengan adanya video, informasi dapat disampaikan secara lebih fleksibel, terdokumentasi dengan baik, dan menjangkau lebih banyak audiens melalui distribusi digital.

c. Terselesaikannya salah satu isu strategis yang dihadapi instansi, yaitu rendahnya pemahaman pelaku IKM mengenai legalitas usaha.

Melalui kegiatan aktualisasi ini, instansi kini memiliki media dan data awal yang dapat digunakan untuk memperkuat program pembinaan. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), tetapi juga mendukung pencapaian tujuan instansi dalam meningkatkan daya saing sektor industri kecil melalui pendampingan dan fasilitasi yang lebih efektif.

B. Rekomendasi

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Selama mengikuti Pelatihan Dasar CPNS ini, saya merasakan bahwa penyelenggara telah memberikan pelayanan yang cukup baik, mulai dari fasilitasi materi, pendampingan dari widyaiswara, hingga sarana prasarana pembelajaran. Semua itu membantu peserta untuk bisa memahami materi dan melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan lancar. Penyelenggara juga mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan interaktif sehingga peserta dapat memahami nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dengan lebih mendalam.

Namun, sebagai bentuk pengembangan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan agar pelaksanaan Latsar di masa mendatang semakin optimal:

1) Pertama, Penguatan sistem monitoring dan pemberian umpan balik secara berkala. Agar proses pembelajaran berjalan lebih terarah, penyelenggara diharapkan menerapkan sistem monitoring yang lebih terstruktur, misalnya dengan evaluasi mingguan terhadap perkembangan peserta. Selain itu, pemberian umpan balik dari widyaiswara secara langsung terhadap progres peserta akan membantu mempercepat perbaikan serta memastikan bahwa setiap tahapan pelatihan dijalankan dengan benar.
2) Kedua, penyelenggara juga disarankan untuk memperbanyak sesi berbagi praktik baik antar peserta. Setiap peserta memiliki isu aktualisasi yang berbeda sesuai unit kerja masing-masing, sehingga jika diberi kesempatan untuk berbagi lebih intensif, hal ini akan memperkaya wawasan dan membuka peluang adopsi ide-ide kreatif lintas instansi. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya menjadi forum pembelajaran individu, tetapi juga ajang kolaborasi yang nyata antar calon ASN.
3) Ketiga, peningkatan variasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diperkuat dengan menambahkan simulasi kasus, permainan peran, atau studi lapangan mini yang relevan dengan pelayanan publik. Langkah ini akan menjadikan proses pembelajaran

lebih menarik, dinamis, dan berorientasi pada penerapan nyata di lapangan.

Dengan adanya beberapa rekomendasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan Latsar ke depan dapat berjalan lebih efektif, aplikatif, dan mampu memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi seluruh peserta.

2. Untuk Instansi Asal Peserta

Selama pelaksanaan Latsar ini, instansi asal peserta yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci telah menunjukkan dukungan yang baik. Pimpinan dan rekan kerja memberikan kesempatan, arahan, serta ruang untuk berkoordinasi dengan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Meski demikian, ada beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian untuk penguatan program pembinaan ke depan:

1. Pemanfaatan media digital sebagai sarana pembinaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Video edukasi hasil aktualisasi dapat dijadikan salah satu media pembelajaran yang digunakan secara rutin. Misalnya, ditayangkan saat kegiatan sosialisasi atau diunggah melalui platform digital resmi instansi agar pelaku IKM dapat mengaksesnya kapan pun.
2. Peningkatan koordinasi lintas bidang. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan akan semakin efektif jika dikolaborasikan dengan bidang lain. Dengan demikian, pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat memperoleh pembinaan yang lebih menyeluruh, mulai dari aspek legalitas, pemasaran, hingga pengembangan produk.

3. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Penggunaan media digital seperti grup komunikasi, laman resmi, atau akun media sosial edukatif dapat membantu mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam mendapatkan panduan terkait perizinan.
4. Penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK secara berkelanjutan. Nilai-nilai seperti akuntabel, kompeten, adaptif, loyal, harmonis, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan perlu terus diinternalisasikan dalam budaya kerja. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, instansi akan semakin profesional dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan penerapan rekomendasi di atas, diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci dapat semakin memperkuat perannya dalam membina pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, adaptif, dan sesuai dengan semangat ASN BerAKHLAK.

LAMPIRAN

Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-1

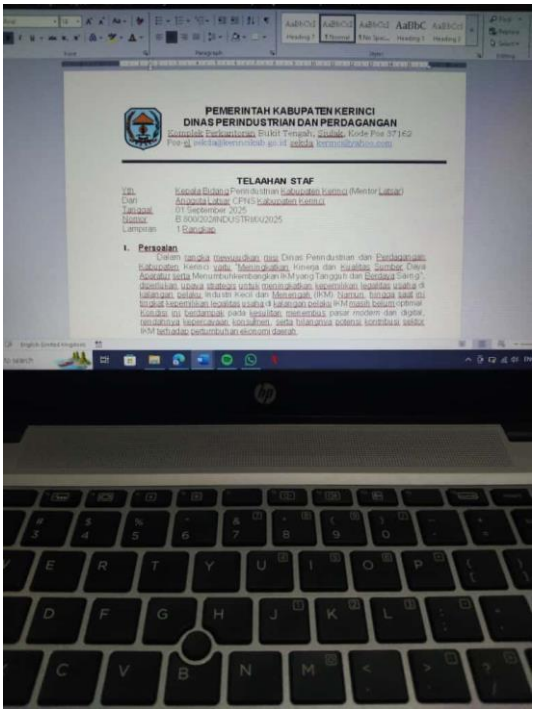
a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<table>
<tr><td>Judul Kegiatan</td><td colspan="2">Melakukan konsultasi rencana dan pelaksanaan aktualisasi</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</td><td colspan="2">01 – 04 September 2025</td></tr>
<tr><td>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence</td><td colspan="2">1. Foto surat telaah staf
2. Dokumentasi bersama mentor
3. Catatan hasil konsultasi
4. Surat telaah staf yang disetujui oleh mentor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</td></tr>
<tr><td>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai Ber-AKHLAK</td><td colspan="2">1. Membuat Surat Telaah Staf kepada Mentor
• Berorientasi Pelayanan
Pada Senin, 1 September 2025, saya mulai membuat surat telaah staf sebagai langkah awal untuk menyusun alur kegiatan. Surat ini saya rancang agar nantinya benar-benar mampu menjawab permasalahan rendahnya kepemilikan legalitas usaha pada pelaku IKM. Setiap kalimat saya susun dengan tujuan agar mudah dipahami oleh mentor yang akan meninjau. Dengan begitu, telaah staf dapat menjadi dasar yang bermanfaat dalam menentukan arah kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
• Akuntabel
Dalam proses penyusunan, saya memastikan setiap isi surat sesuai dengan aturan tata naskah dinas yang berlaku. Saya membuka kembali peraturan terbaru, membandingkannya dengan contoh surat sebelumnya, lalu menyesuaikan format di aplikasi Srikandi. Setiap detail saya periksa secara hati-hati agar tidak ada kekeliruan yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan cara ini, surat yang saya buat dapat dipertanggungjawabkan dari sisi isi maupun bentuk.
• Kompeten
Saya meluangkan waktu khusus untuk mempelajari tata cara penulisan telaah staf, karena ini adalah hal yang baru bagi saya. Awalnya, beberapa istilah teknis terasa membingungkan, namun saya mencari referensi tambahan untuk memahami maknanya. Saya juga sempat berdiskusi singkat dengan rekan</td></tr>
</table>

	kerja untuk memastikan format yang saya gunakan sudah tepat. Proses ini mengajarkan saya bahwa kompetensi dibangun dari usaha belajar dan latihan yang konsisten. • **Adaptif** Karena ini pertama kalinya saya membuat surat telaah staf, saya harus beradaptasi dengan cepat terhadap format dan aturan yang baru. Saya membaca ulang regulasi yang berlaku dan menyesuaikan isi surat dengan kondisi terkini agar tetap relevan. Awalnya terasa sulit karena banyak istilah yang kurang familiar, namun saya mencoba mengubah pola pikir agar tantangan ini menjadi peluang untuk belajar. Dengan begitu, saya bisa menyelesaikan surat sesuai standar meski berangkat dari pengalaman pertama. **2. Melaksanakan Konsultasi dengan Mentor** • **Berorientasi Pelayanan** Pada Selasa, 2 September 2025, saya menyerahkan draft surat telaah staf kepada mentor sambil memaparkan garis besar rancangan aktualisasi. Saya menyampaikan penjelasan dengan tujuan agar mentor dapat menilai apakah rancangan ini bermanfaat untuk pelaku IKM. Masukan dari mentor berupa saran agar video edukasi dibuat sederhana dan mudah dipahami langsung saya catat. Hal ini membuat saya semakin sadar bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. • **Akuntabel** Selama diskusi, saya menyampaikan rencana kegiatan secara runtut agar mudah dipahami. Saya membawa catatan kecil untuk menulis semua arahan yang diberikan oleh mentor. Setiap masukan saya simpan dengan rapi agar tidak ada hal yang terlewat dalam proses revisi. Dengan cara ini, saya menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap tindak lanjut dari konsultasi tersebut. • **Kompeten** Saya menyampaikan ide dengan bahasa yang jelas, singkat, dan tidak berbelit agar mentor mudah menangkap maksud saya. Ketika menerima masukan, saya menanggapi dengan antusias sambil menuliskan detail yang penting.

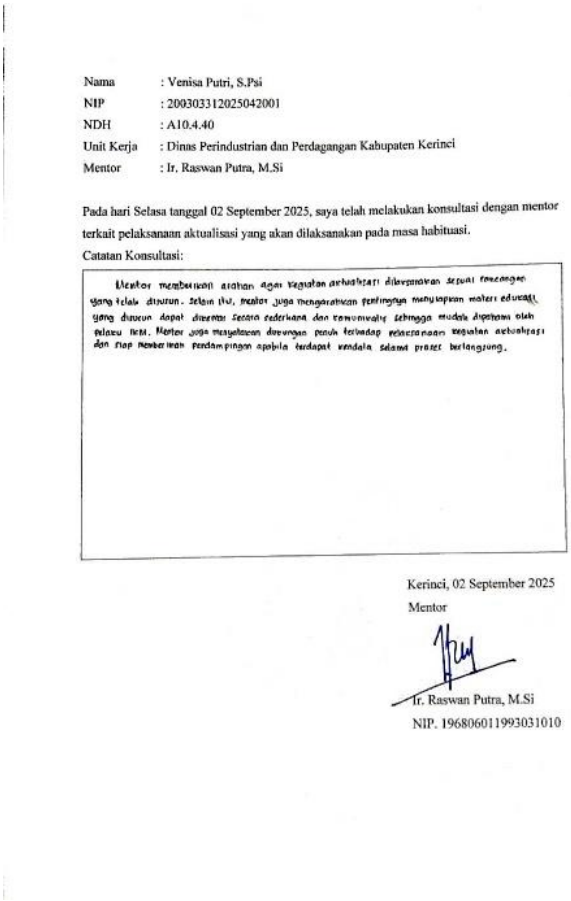
	Saya menyadari bahwa setiap saran dari mentor menambah pengetahuan saya dalam menyusun kegiatan. Dengan begitu, kompetensi saya dalam memahami alur kerja dan menyusun rancangan semakin berkembang. • **Harmonis** Dalam proses konsultasi, saya menjaga sikap ramah dan sopan sejak awal pertemuan. Saya mendengarkan arahan mentor dengan penuh perhatian, tanpa menyela, dan mengajukan pertanyaan dengan cara yang santun. Suasana diskusi pun berjalan kondusif karena ada saling menghargai dalam komunikasi. Keharmonisan ini membuat konsultasi menjadi lebih efektif dan menyenangkan. • **Loyal** Saya menunjukkan loyalitas dengan menerima setiap masukan mentor dan menyesuaikan gagasan saya agar selaras dengan visi misi organisasi. Bagi saya, mengikuti arahan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bukti bahwa saya mendukung tujuan besar organisasi. Saya tidak memaksakan ide pribadi jika memang tidak sesuai dengan arahan instansi. Hal ini menjadi bentuk komitmen saya untuk menjaga nama baik dinas melalui pekerjaan yang saya lakukan. • **Adaptif** Dalam konsultasi, mentor memberikan beberapa saran yang membuat saya harus mengubah rancangan awal. Meskipun ada revisi, saya tetap berusaha mengintegrasikan arahan tersebut tanpa mengubah tujuan utama. Saya melihat perubahan ini bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki rancangan agar lebih tepat sasaran. Sikap adaptif ini membantu saya menjalankan arahan dengan fleksibel namun tetap terarah. • **Kolaboratif** Kegiatan konsultasi ini menjadi contoh nyata penerapan nilai *Kolaboratif*. Saya dan mentor saling bertukar pandangan, membahas kendala, serta menyusun solusi bersama agar kegiatan aktualisasi lebih terarah. Saya tidak hanya mendengarkan masukan, tetapi juga aktif memberikan pendapat dan ide perbaikan yang bisa diterapkan. Suasana komunikasi yang

	terbuka dan saling menghargai membuat proses konsultasi berjalan lancar dan produktif. Melalui kolaborasi ini, saya merasa lebih percaya diri dan semakin memahami pentingnya kerja sama lintas peran dalam mencapai tujuan organisasi. **3. Mengajukan Surat Telaah Staf kepada Mentor** • **Berorientasi Pelayanan** Pada Rabu, 3 September 2025, saya menyerahkan surat telaah staf yang sudah direvisi kepada mentor. Saya juga menjelaskan kembali tujuan kegiatan agar implementasi aktualisasi benar-benar memberi manfaat bagi pelaku IKM. Dengan menjelaskan tujuan, saya ingin memastikan bahwa surat ini tidak hanya formalitas tetapi benar-benar bisa membantu pelaku usaha. Sikap ini menunjukkan bahwa orientasi pelayanan selalu saya jadikan prioritas utama dalam pekerjaan. • **Akuntabel** Saya bertanggung jawab penuh atas setiap revisi yang saya lakukan pada surat telaah staf. Semua masukan mentor sudah saya masukkan secara sistematis agar dokumen lebih rapi dan sesuai format. Saya juga menyimpan salinan dari versi sebelum dan sesudah revisi sebagai bukti transparansi. Dengan begitu, surat ini bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik dari segi isi maupun perbaikan yang dilakukan. • **Harmonis** Proses penyerahan surat saya lakukan dengan menjaga etika komunikasi. Saya menyapa mentor dengan sopan, mendengarkan komentar beliau, lalu menanggapinya dengan sikap rendah hati. Suasana penyerahan terasa hangat karena ada rasa saling menghargai. Keharmonisan ini membuat hubungan kerja lebih positif dan mendukung kelancaran kegiatan. • **Loyal** Saya menunjukkan loyalitas dengan menaati arahan mentor sepenuhnya, termasuk menunda tanda tangan sampai dokumen benar-benar sempurna. Saya tidak terburu-buru hanya untuk menyelesaikan pekerjaan, melainkan lebih memilih memastikan kualitas sesuai harapan instansi. Hal ini menunjukkan kesetiaan saya pada misi organisasi dengan memberikan hasil

	terbaik. Dengan begitu, surat telaah staf yang diajukan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mendukung nama baik dinas.
2. Teknik Aktualisasi yang digunakan dan bukti fisik kegiatan / *evidence*	**1. Membuat Surat Telaah Staf kepada Mentor** Teknik yang digunakan adalah penyusunan dokumen melalui aplikasi Srikandi. Saya menyusun surat telaah staf sesuai format yang tersedia sehingga dokumen dapat langsung digunakan sebagai dasar konsultasi.  PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TELAAHAN STAF **Gambar 1. Membuat Surat Telaah Staf** **2. Melaksanakan Konsultasi dengan Mentor** Teknik yang digunakan adalah diskusi tatap muka. Melalui pertemuan langsung, saya menyampaikan rancangan aktualisasi, menerima masukan, dan mencatat arahan yang diberikan mentor untuk memperkuat rencana kegiatan.



Gambar 2. Melaksanakan Konsultasi dengan Mentor



Nama : Venisa Putri, S.Psi
NIP : 200303312025042001
NDH : A10.4.40
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
Mentor : Ir. Raswan Putra, M.Si

Pada hari Selasa tanggal 02 September 2025, saya telah melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada masa habituasi.

Catatan Konsultasi:

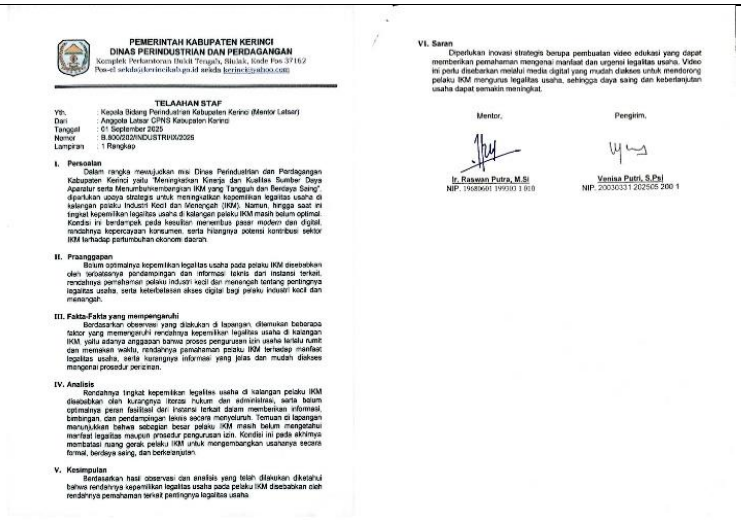
Mentor memberikan arahan agar kegiatan aktualisasi dilaksanakan sesuai rancangan yang telah disusun. Selain itu, mentor juga mengarahkan pentingnya menyiapkan materi edukatif yang disusun dapat disampaikan secara sederhana dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh peserta nanti. Mentor juga menyetujui dirancang pantau terhadap pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan siap memberikan pendampingan apabila terdapat kendala selama proses berlangsung.

Kerinci, 02 September 2025
Mentor

Ir. Raswan Putra, M.Si
NIP. 196806011993031010

Gambar 3. Catatan Konsultasi dengan Mentor

3. **Mengajukan Surat Telaah Staf kepada Mentor**
   Teknik yang digunakan adalah penyampaian dokumen resmi. Saya menyerahkan surat telaah staf yang telah selesai disusun kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el sekdisjderincikab.go.id sekda.kerinci@yahoo.com
TELAAHAN STAF
Yth. : Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Kerinci (Mentor Latsar)
Dari : Anggota Latsar CPNS Kabupaten Kerinci
Tanggal : 01 September 2025
Nomor : B.800/203/INDUSTRI/IX/2025
Lampiran : 1 Rangkap
I. Persoalan
Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci yaitu 'Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Sumber Daya Aparatur serta Menumbuhkembangkan IKM yang Tangguh dan Berdaya Saing', diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kepemilikan legalitas usaha di kalangan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Namun, hingga saat ini tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan pelaku IKM masih belum optimal. Kondisi ini berdampak pada kesulitan memenibus pasar modern dan digital, rendahnya kepercayaan konsumen, serta hilangnya potensi kontribusi sektor IKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
II. Praanggapan
Belum optimalnya kepemilikan legalitas usaha pada pelaku IKM disebabkan oleh terbatasnya pendampingan dan informasi teknis dari instansi terkait, rendahnya pemahaman pelaku industri kecil dan menengah tentang pentingnya legalitas usaha, serta keterbatasan akses digital bagi pelaku industri kecil dan menengah.
III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya kepemilikan legalitas usaha di kalangan IKM, yaitu adanya anggapan bahwa proses pengurusan izin usaha terlalu rumit dan memakan waktu, rendahnya pemahaman pelaku IKM terhadap manfaat legalitas usaha, serta keterbatasan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur perizinan.
IV. Analisis
Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha di kalangan pelaku IKM disebabkan oleh kurangnya literasi hukum dan administrasi, serta belum optimalnya peran fasilitasi dari instansi terkait dalam memberikan informasi, bimbingan, dan pendampingan teknis secara menyeluruh. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku IKM masih belum mengetahui manfaat legalitas maupun prosedur pengurusan izin. Kondisi ini pada akhirnya membatasi ruang gerak pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya secara formal, berdaya saing, dan berkelanjutan.
V. Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan dikelahui bahwa rendahnya kepemilikan legalitas usaha pada pelaku IKM disebabkan oleh rendahnya pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha.
VI. Saran
Diperlukan inovasi strategis berupa pembuatan video edukasi yang dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat dan urgensi legalitas usaha. Video ini perlu disebarkan melalui media digital yang mudah diakses untuk mendorong pelaku IKM mengurus legalitas usaha, sehingga daya saing dan keberlanjutan usaha dapat semakin meningkat.
Mentor, Pengirim,
Ir. Rasean Putra, M.Si
NIP. 19680601 199001 1 003
Venisa Putri, S.Psi
NIP. 20030331 202505 200 1
Gambar 4. Surat Telaah Staf yang Telah Disetujui Oleh Mentor
</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Deskripsi Proses dan Kualitas Kegiatan</td>
<td>
1. Membuat Surat Telaah Staf kepada Mentor
Pada hari pertama, saya memulai kegiatan aktualisasi dengan menyusun surat telaah staf melalui aplikasi Srikandi. Dokumen ini berisi uraian persoalan, praanggapan, fakta, analisis, kesimpulan, dan saran terkait isu rendahnya kepemilikan legalitas usaha di kalangan pelaku IKM. Saya menyusunnya dengan mengikuti format resmi yang berlaku agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar konsultasi bersama mentor. Dalam proses ini, saya juga berusaha teliti dan menyesuaikan isi dokumen dengan ketentuan terbaru agar surat yang dibuat tetap relevan, mutakhir, serta siap dipertanggungjawabkan.

2. Melaksanakan Konsultasi dengan Mentor
Setelah surat telaah staf selesai disusun, saya melaksanakan konsultasi dengan mentor. Pada pertemuan ini, saya menyampaikan rancangan aktualisasi sekaligus menyerahkan dokumen telaah staf sebagai bahan diskusi. Mentor memberikan banyak masukan yang sangat berharga, di antaranya saran agar materi video edukasi nantinya dapat dikemas secara sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pelaku IKM. Saya mencatat seluruh arahan tersebut dengan teliti untuk menjadi acuan dalam penyempurnaan kegiatan. Dari proses konsultasi ini, saya belajar menjaga komunikasi yang harmonis, menghargai setiap masukan, serta menunjukkan sikap akuntabel dengan segera menindaklanjuti arahan yang diberikan.
</td>
</tr>
</table>

	3. Mengajukan Surat Telaah Staf kepada Mentor Tahap terakhir adalah mengajukan surat telaah staf yang telah direvisi sesuai masukan sebelumnya kepada mentor. Dokumen saya serahkan secara resmi dan diterima dengan baik. Setelah diperiksa, surat telaah staf tersebut dinyatakan layak dan disetujui sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi. Persetujuan ini menjadi tanda bahwa rancangan kegiatan saya sudah sesuai dengan arahan mentor dan siap untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Dari pengalaman ini, saya belajar pentingnya sikap loyal dalam mengikuti arahan, menjaga kualitas dokumen agar rapi dan sesuai aturan, serta memastikan bahwa hasil kerja benar-benar bermanfaat bagi organisasi.
4. Manfaat Kegiatan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi	Tahap terakhir adalah mengajukan surat telaah staf yang telah direvisi sesuai masukan sebelumnya kepada mentor. Dokumen saya serahkan secara resmi dan diterima dengan baik. Setelah diperiksa, surat telaah staf tersebut dinyatakan layak dan disetujui sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi. Persetujuan ini menjadi tanda bahwa rancangan kegiatan saya sudah sesuai dengan arahan mentor dan siap untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Dari pengalaman ini, saya belajar pentingnya sikap loyal dalam mengikuti arahan, menjaga kualitas dokumen agar rapi dan sesuai aturan, serta memastikan bahwa hasil kerja benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Bagi organisasi, hadirnya video edukasi ini mendukung tugas dinas dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan terkait pentingnya legalitas usaha. Dengan konten yang jelas dan visual yang menarik, IKM lebih mudah memahami langkah-langkah pengurusan izin dasar maupun izin lainnya. Hal ini memperkuat peran dinas sebagai instansi yang aktif mendorong legalitas usaha, sehingga IKM lebih terlindungi, dipercaya, dan berdaya saing.
5. Analisis Dampak jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NDS	**1) Dampak terhadap Satuan Kerja** • **Berorientasi Pelayanan** Jika orientasi pelayanan diabaikan, surat telaah staf hanya akan menjadi dokumen formalitas tanpa memberikan manfaat nyata. Isinya bisa tidak menjawab kebutuhan organisasi maupun pelaku IKM. Kondisi ini membuat kegiatan aktualisasi tidak relevan dengan permasalahan utama yang ingin

	diselesaikan. Akibatnya, satuan kerja gagal menunjukkan kepeduliannya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. • **Akuntabel** Jika nilai akuntabel diabaikan, surat telaah staf tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Dokumen yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan bisa berisi data yang tidak jelas sumbernya. Hal ini akan menurunkan kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan pegawai dalam mengelola dokumen resmi. Akhirnya, kredibilitas organisasi ikut terpengaruh. • **Kompeten** Tanpa kompetensi, isi surat telaah staf berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dokumen menjadi tidak tepat sasaran, sehingga tidak mendukung pencapaian tujuan dinas. Kelemahan ini dapat menghambat kelancaran program pembinaan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, satuan kerja bisa dipandang tidak mampu menghasilkan dokumen yang berkualitas. • **Harmonis** Jika sikap harmonis tidak dijalankan, komunikasi internal dengan mentor maupun rekan kerja bisa terganggu. Perbedaan pendapat berisiko menimbulkan ketegangan dan menghambat persetujuan dokumen. Proses konsultasi yang seharusnya berjalan kondusif menjadi tidak lancar. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tertunda dan target kerja organisasi tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan. • **Loyal** Tanpa loyalitas, arahan dari mentor maupun pimpinan dapat diabaikan dalam penyusunan surat. Hal ini menjadikan hasil dokumen tidak sejalan dengan arah kebijakan organisasi. Keadaan tersebut melemahkan citra positif pegawai karena terlihat tidak mendukung tujuan instansi. Jika hal ini terus berulang, pimpinan akan

	menilai pegawai kurang berkomitmen terhadap organisasi. • **Adaptif** Tanpa nilai adaptif, penyusunan dokumen tidak menyesuaikan dengan format atau aturan terbaru. Surat yang dibuat menjadi tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga tidak dapat digunakan secara efektif untuk mendukung kinerja satuan kerja. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa pegawai tidak mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi. Akhirnya, organisasi dirugikan karena dokumen resmi yang ada tidak bisa dijadikan dasar kegiatan. **2) Dampak terhadap Masyarakat** • **Akuntabel** Apabila akuntabilitas tidak dijaga saat konsultasi, masukan dari mentor bisa saja tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam rencana kegiatan. Hal ini membuat pelaksanaan aktualisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Dampaknya, program yang dijalankan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Akhirnya, pelaku IKM tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari kegiatan pembinaan. • **Kompeten** Jika kompetensi tidak diterapkan, hasil konsultasi tidak menghasilkan perencanaan yang matang. Pegawai bisa salah memahami arahan mentor sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang relevan dengan kondisi lapangan. Hal ini membuat pelaku IKM kesulitan mendapatkan informasi yang tepat mengenai legalitas usaha. Akibatnya, masyarakat tidak terbantu dalam memahami langkah yang benar untuk mengurus usahanya. • **Berorientasi Pelayanan** Tanpa orientasi pelayanan, konsultasi hanya dianggap sebagai formalitas tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Rencana yang dihasilkan berisiko tidak menjawab masalah rendahnya kepemilikan legalitas usaha. Masyarakat akhirnya

	tetap tidak mendapatkan solusi yang mereka butuhkan. Kondisi ini menurunkan kepercayaan pelaku IKM terhadap pemerintah sebagai pemberi layanan. • **Adaptif** Jika nilai adaptif diabaikan, pegawai tidak mampu menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi terbaru atau masukan dari mentor. Program yang dijalankan bisa terasa kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku IKM. Hal ini membuat masyarakat kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Akhirnya, pesan penting mengenai legalitas usaha gagal tersampaikan. • **Harmonis** Apabila nilai harmonis tidak diterapkan, komunikasi saat konsultasi bisa berjalan kaku dan tidak nyaman. Arahan dari mentor bisa disalahpahami karena pegawai tidak terbuka dalam mendengarkan. Hal ini berdampak pada kualitas rencana kegiatan yang tidak maksimal. Akibatnya, masyarakat hanya akan menerima program yang setengah matang dan kurang bermanfaat. • **Loyal** Jika loyalitas tidak dijaga, pegawai berisiko mengabaikan arahan mentor atau pimpinan dalam penyusunan rencana. Kegiatan yang dirancang bisa melenceng dari visi dan misi organisasi. Hal ini membuat masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah secara nyata dalam membantu mereka. Akhirnya, pelaku IKM kehilangan kepercayaan karena program yang diberikan tidak selaras dengan tujuan organisasi.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	Selasa/ 02 September 2025	Konsultasi Matrik Jadwal Aktualisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	Ditandatangani surat telaah staf oleh mentor	
2				
3				
4				

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Coach
1				
2				

Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-2

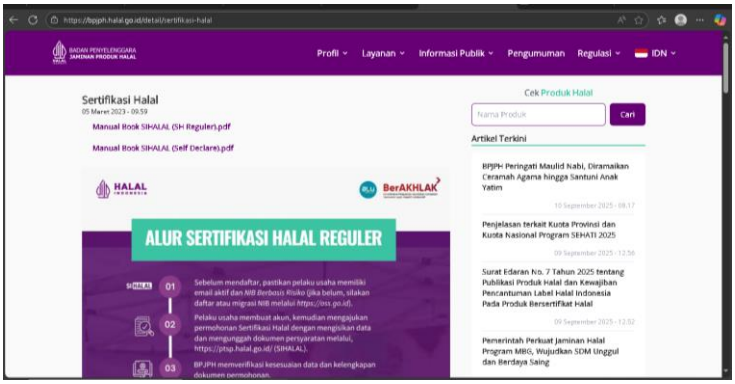
a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

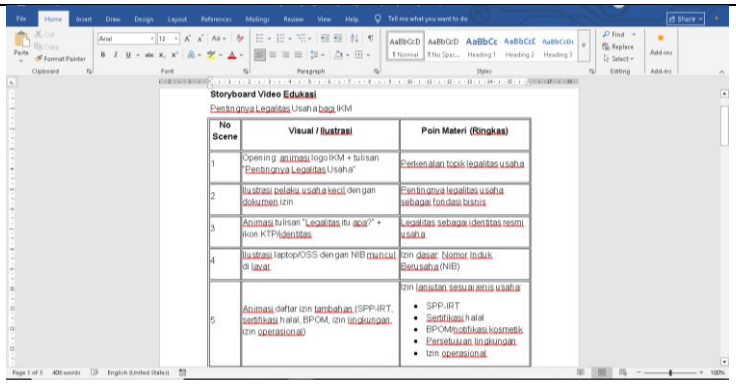
<table>
<tr><td>Judul Kegiatan</td><td colspan="2">Membuat Video Edukasi tentang Pentingnya Legalitas Usaha bagi IKM</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</td><td colspan="2">08 – 13 September 2025</td></tr>
<tr><td>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence</td><td colspan="2">1. Materi pentingnya legalitas usaha
2. Storyboard video edukasi
3. Dokumentasi konsultasi materi dan konsep video kepada mentor
4. Catatan hasil konsultasi
5. Diskusi dengan rekan kerja
6. Draft naskah narasi
7. Visual pendukung (logo, ilustrasi, gambar)
8. Proses editing video
9. Draft video edukasi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</td></tr>
<tr><td>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai Ber-AKHLAK</td><td colspan="2">1. Mengidentifikasi Materi Terkait Pentingnya Legalitas Usaha dan Membuat Konsep Video serta Mengkonsultasikannya kepada Mentor
• Berorientasi Pelayanan
Pada tahap awal, saya mengumpulkan informasi resmi terkait legalitas usaha dari sumber resmi dan menyusunnya dengan membagi ke dalam dua kategori, yaitu izin dasar (NIB) dan izin lainnya (SPP-IRT, Sertifikat Halal, izini edar BPOM & Notifikasi Kosmetik, serta Persetujuan Lingkungan). Dengan cara ini, alur video lebih mudah dipahami oleh pelaku IKM. Saya juga memastikan materi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku IKM, agar konten video tidak hanya sekedar formalitas tetapi benar-benar bermanfaat. Dengan begitu, hasil video edukasi benar-benar dapat membantu IKM memahami pentingnya legalitas usaha untuk pengembangan usahanya.
• Akuntabel
Seluruh data dan informasi saya dapatkan dari sumber resmi, seperti OSS, BPOM, dan BPJPH, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Saya juga menyusun catatan yang rapi dan sistematis agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyusunan naskah</td></tr>
</table>

	maupun *storyboard*. Dengan cara ini, setiap materi dalam video bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari segi isi maupun penyajian. • **Kompeten** Saya mempelajari ulang berbagai referensi terkait regulasi dan prosedur perizinan usaha, kemudian merangkum inti materinya agar lebih mudah dipahami. Proses ini melatih saya untuk mengolah informasi kompleks menjadi konsep sederhana yang bisa dipahami pelaku IKM dengan cepat. Dalam proses penyusunan storyboard, saya juga berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan isi materi sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Masukan dari mentor saya gunakan untuk memperbaiki bagian yang kurang tepat dan menambahkan hal-hal yang perlu diperjelas. Dengan begitu, konsep video menjadi lebih matang, terarah, dan kompetensi saya semakin terasah karena dituntut untuk menyajikan materi yang akurat sekaligus mudah diterima audiens. • **Adaptif** Saya menyesuaikan materi yang dikumpulkan dengan kebutuhan nyata pelaku IKM yang beragam. Jika ada informasi yang terlalu teknis atau kurang relevan, saya ringkas dan sesuaikan agar mudah dipahami audiens. Adaptasi ini memastikan konsep video tetap efektif untuk berbagai jenis pelaku usaha. • **Kolaboratif** Dalam proses penyusunan konsep video, saya berkoordinasi dengan mentor untuk memastikan isi materi sudah sesuai dengan kebijakan dinas dan kebutuhan pelaku IKM. Saya juga berdiskusi mengenai urutan penyajian materi agar alur video lebih jelas dan menarik. Kolaborasi ini membantu saya melihat sudut pandang yang lebih luas serta memastikan hasil akhir benar-benar selaras dengan tujuan organisasi. **2. Menyusun Naskah dan Visual Pendukung Video** • **Kompeten** Saya menyusun naskah narasi dengan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif agar mudah dipahami oleh pelaku IKM dari berbagai latar belakang. Saya berusaha menghindari istilah

	yang terlalu teknis supaya naskah tetap ramah bagi audiens awam. Selain itu, saya menata isi naskah agar alurnya runtut sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Dengan begitu, naskah yang disusun tidak hanya informatif tetapi juga efektif untuk digunakan dalam video edukasi. • **Adaptif** Saya menyesuaikan gaya bahasa dan visual dengan karakter audiens yang beragam. Naskah ditulis dengan bahasa sederhana agar tidak membingungkan, sementara visual saya buat menarik dengan bantuan ilustrasi digital dari ChatGPT, Gemini, dan Canva. Hasil visual saya cek kembali agar sesuai dengan konteks dan relevan dengan informasi resmi. Dengan cara ini, saya beradaptasi terhadap kebutuhan audiens sekaligus memanfaatkan teknologi digital modern untuk memperkuat pesan edukasi. • **Berorientasi Pelayanan** Dalam menyusun naskah dan visual, saya selalu memperhatikan kenyamanan audiens. Visual dibuat menarik, warna dan ilustrasi dipilih agar mendukung pemahaman, serta alur naskah disusun agar mudah diikuti. Dengan pendekatan ini, video edukasi dapat benar-benar menjadi sarana pelayanan publik yang bermanfaat bagi pelaku IKM. • **Kolaboratif** Dalam penyusunan naskah dan visual, saya juga berdiskusi dengan rekan kerja untuk memastikan konten yang dibuat sesuai dengan identitas instansi. Diskusi ini membantu saya memilih warna, ilustrasi, dan tata letak yang mendukung pesan utama tanpa berlebihan. Kolaborasi ini juga mengajarkan saya bahwa pendapat orang lain bisa memberikan perspektif baru untuk memperbaiki hasil kerja. Dengan demikian, naskah dan visual yang dihasilkan menjadi lebih matang dan sesuai dengan standar instansi. **3. Membuat Konten Video Edukasi** • **Berorientasi Pelayanan** Saya menyusun video dengan durasi sekitar 3-4 menit agar cukup singkat namun tetap padat informasi. Hal ini saya lakukan supaya pelaku IKM tidak jenuh menonton, tetapi tetap memperoleh

	pesan penting yang dibutuhkan. Video saya desain agar bisa ditonton oleh semua kalangan, termasuk yang tidak terbiasa dengan istilah teknis. Dengan begitu, video edukasi ini benar-benar menjadi sarana pelayanan publik yang bermanfaat. • **Akuntabel** Proses editing saya lakukan berdasarkan storyboard dan naskah yang sudah disusun sebelumnya. Saya memastikan setiap visual, narasi, dan informasi berasal dari sumber yang terpercaya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Editing saya kerjakan menggunakan aplikasi Canva, dengan dokumentasi screenshot untuk menunjukkan proses kerja. Dengan langkah ini, saya bisa mempertanggungjawabkan isi maupun teknis penyajian video secara jelas. • **Loyal** Dalam video, saya menambahkan logo resmi Kementerian Perindustrian serta menjaga konsistensi desain agar tetap sesuai dengan identitas organisasi. Musik latar saya pilih yang profesional untuk mendukung citra positif dinas. Saya memastikan hasil video tidak hanya menyampaikan pesan edukatif, tetapi juga memperlihatkan citra baik instansi di mata masyarakat. Sikap loyal ini menjadi bentuk nyata menjaga nama baik organisasi melalui karya yang saya hasilkan. • **Kompeten** Saya melatih keterampilan editing dengan menggunakan Canva, memanfaatkan fitur transisi, animasi, dan tata letak agar video lebih menarik. Walaupun sederhana, saya berusaha menghadirkan hasil terbaik sesuai dengan storyboard. Saya juga menambahkan ilustrasi pendukung yang sudah dibuat sebelumnya agar video lebih komunikatif. Dengan proses ini, saya semakin terampil dalam menggabungkan elemen teks, suara, dan visual ke dalam sebuah produk multimedia. • **Adaptif** Saya menyesuaikan proses pembuatan video dengan memanfaatkan fitur-fitur di aplikasi editing (Canva) seperti transisi, animasi, dan tata letak.

	Saya mengatur durasi, tempo, dan visual agar sesuai dengan kebutuhan audiens yang beragam. Jika ada bagian yang terlalu panjang atau kompleks, saya lakukan penyederhanaan agar video tetap efektif, informatif, dan mudah dipahami oleh semua pelaku IKM.
2. Teknik Aktualisasi yang digunakan dan bukti fisik kegiatan / *evidence*	**1) Mengidentifikasi Materi Terkait Pentingnya Legalitas Usaha dan Konsep Video, serta Mengkonsultasikannya kepada Mentor** Teknik yang digunakan adalah studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber resmi seperti OSS, BPOM, dan BPJPH. Dari hasil kajian tersebut, saya menyusun catatan poin-poin penting terkait legalitas usaha yang relevan untuk pelaku IKM. Selanjutnya, materi tersebut saya rangkai ke dalam bentuk storyboard sederhana sehingga alur video lebih jelas dan mudah dipahami. Setelah itu, saya mengkonsultasikannya dengan mentor untuk memastikan materi yang disusun sudah tepat sasaran.  **Gambar 1. Identifikasi Materi Terkait Pentingnya Legalitas Usaha**



Storyboard Video Edukasi

Pentingnya Legalitas Usaha bagi IKM

No Scene	Visual / Ilustrasi	Poin Materi (Ringkas)
1	Opening: animasi logo IKM + tulisan "Pentingnya Legalitas Usaha"	Perkenalan topik legalitas usaha
2	Ilustrasi pelaku usaha kecil dengan dokumen izin	Pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi bisnis
3	Animasi tulisan "Legalitas itu apa?" + ikon KTP/identitas	Legalitas sebagai identitas resmi usaha
4	Ilustrasi laptop/OSS dengan NIB muncul di layar	Izin dasar: Nomor Induk Berusaha (NIB)
5	Animasi daftar izin tambahan (SPP-IRT, sertifikasi halal, BPOM, izin lingkungan, izin operasional)	Izin tanusan sesuai jenis usaha: • SPP-IRT • Sertifikasi halal • BPOM/sertifikasi kosmetik • Persetujuan lingkungan • Izin operasional

Gambar 2. *Storyboard* Video Edukasi



Gambar 3. Mengkonsultasikan Materi dan Konsep Video kepada Mentor

Nama : Venisa Putri, S.Psi
NIP : 200303312025042001
NDH : A10.4.40
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
Mentor : Ir. Raswan Putra, M.Si

Pada hari Senin tanggal 08 September 2025, saya telah melakukan konsultasi dengan mentor terkait materi dan konsep video pentingnya legalitas usaha bagi pelaku IKM
Catatan Konsultasi:

Kerinci, 08 September 2025
Mentor

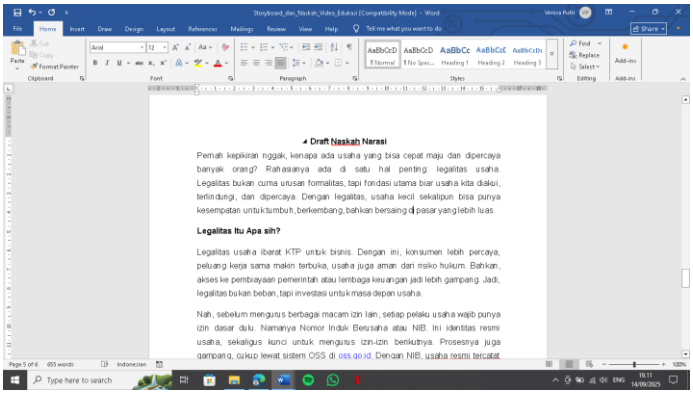
Ir. Raswan Putra, M.Si
NIP. 196806011993031010

Gambar 4. Catatan Hasil Konsultasi

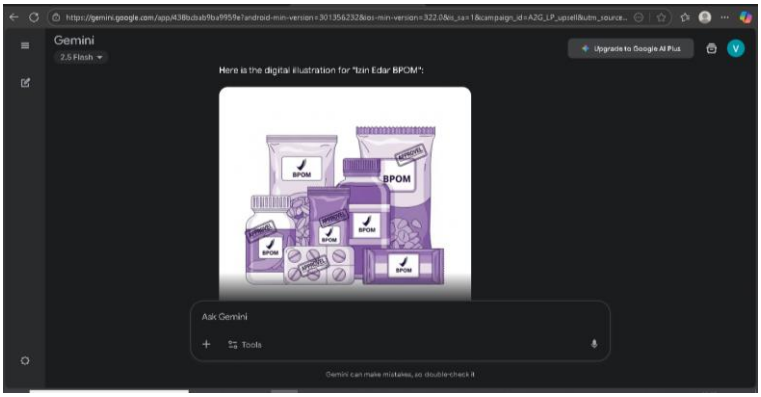
2) Menyusun Naskah dan Visual Pendukung Video

Teknik yang digunakan adalah penulisan naskah

narasi dengan bahasa komunikatif dan sederhana, agar bisa diterima oleh pelaku IKM dari berbagai latar belakang. Untuk visual pendukung, saya menggunakan desain grafis sederhana dengan bantuan ChatGPT, Gemini, dan Canva dalam menghasilkan ilustrasi digital yang relevan, lalu menyesuaikannya agar sesuai dengan konteks materi. Visual ini dipadukan dengan identitas Kementerian Perindustrian seperti logo resmi, sehingga pesan yang disampaikan lebih kuat dan kredibel. Dalam proses ini saya juga berdiskusi dengan rekan kerja untuk mendapatkan masukan tambahan terkait pemilihan bahasa, visual, dan alur konten.



Gambar 5. Draft Naskah Narasi Video Edukasi



Gambar 6. Membuat Visual Pendukung Video Edukasi



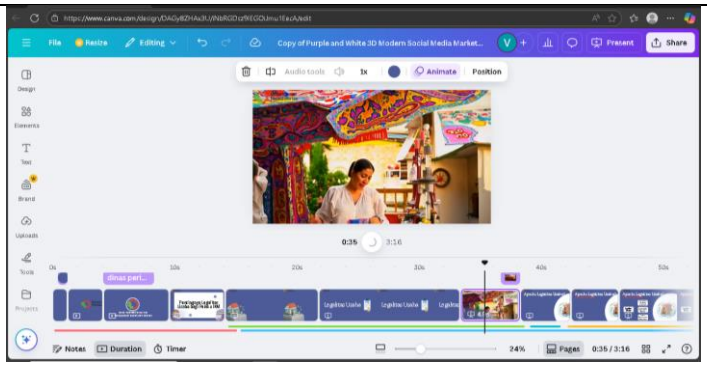
Gambar 7. Berdiskusi dengan Rekan Kerja

3) Membuat Konten Video Edukasi

Teknik yang digunakan adalah editing video digital dengan aplikasi Canva. Saya menggabungkan naskah narasi, visual pendukung, dan musik latar ke dalam satu kesatuan video. Proses editing dilakukan dengan menyesuaikan tempo, transisi, dan tata letak agar hasil akhir terlihat profesional dan nyaman ditonton. Dengan cara ini, video edukasi yang dihasilkan lebih komunikatif, mudah diikuti, dan sesuai dengan tujuan instansi.



Gambar 8. Proses Editing Video

	 **Gambar 9. Draft Video Edukasi**
3. Deskripsi Proses dan Kualitas Kegiatan	**1. Mengidentifikasi Materi Terkait Pentingnya Legalitas Usaha dan Membuat Konsep Video serta Mengkonsultasikannya kepada Mentor** Pada tahap awal, saya mengumpulkan informasi resmi mengenai legalitas usaha yang perlu dimiliki pelaku IKM. Materi yang dipilih mencakup izin dasar berupa NIB serta izin lainnya, seperti SPP-IRT, sertifikasi halal, izin edar BPOM, persetujuan lingkungan, dan izin operasional. Semua informasi saya rangkai ke dalam catatan poin-poin inti yang kemudian saya susun menjadi storyboard sederhana sebagai kerangka awal video. Untuk memastikan kualitas dan kesesuaian materi, saya mengkonsultasikan storyboard dan konsep materi kepada mentor. Masukan dari mentor saya gunakan untuk memperbaiki bagian yang kurang jelas, menambahkan hal-hal yang perlu diperjelas, serta memastikan alur video mudah dipahami. Proses ini saya lakukan dengan teliti agar alur video edukasi sistematis dan komunikatif. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa penguasaan materi yang tepat serta validasi dari mentor sangat menentukan kualitas konten, karena tanpa konsep yang terarah dan pengecekan kualitas, video tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. **2. Menyusun Naskah dan Visual Pendukung Video** Setelah konsep tersusun, saya melanjutkan dengan membuat naskah narasi yang komunikatif dan mudah dipahami oleh pelaku IKM dari berbagai latar belakang. Bahasa saya buat sederhana, runtut, dan tidak terlalu teknis agar tetap ramah bagi audiens

	awam. Pada tahap ini, saya juga menyiapkan visual pendukung berupa ilustrasi digital yang dihasilkan menggunakan bantuan ChatGPT, Gemini, dan Canva. Ilustrasi tersebut saya pilih dan sesuaikan kembali agar sesuai konteks materi, lalu dipadukan dengan elemen identitas instansi seperti logo resmi. Proses ini saya lakukan sambil berdiskusi dengan mentor dan rekan kerja untuk memastikan kesesuaian naskah dan visual. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa kombinasi antara narasi yang jelas dan visual yang tepat sangat penting untuk menciptakan konten edukasi yang kuat, menarik, dan mudah diingat. **3. Membuat Konten Video Edukasi** Tahap terakhir adalah menyatukan semua komponen yang sudah dipersiapkan menjadi satu kesatuan video edukasi. Saya menggunakan aplikasi Canva untuk melakukan proses editing, menggabungkan naskah audio, ilustrasi, transisi, dan musik latar agar video terlihat profesional. Durasi video saya jaga sekitar 3-4 menit, sehingga isinya tetap padat namun tidak membosankan bagi penonton. Saya juga memperhatikan detail seperti keserasian warna, tempo transisi, dan keseimbangan antara teks dengan visual agar hasilnya nyaman ditonton. Produk yang dihasilkan berupa draft video edukasi yang runtut, jelas, dan siap untuk ditinjau lebih lanjut oleh mentor. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa ketelitian dan konsistensi dalam mengikuti storyboard sangat menentukan kualitas hasil akhir.
4. Manfaat Kegiatan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi	Kegiatan pada minggu ke-2 ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci. Melalui identifikasi materi, penyusunan naskah, hingga pembuatan video edukasi, saya berkontribusi menghadirkan media edukasi yang praktis, modern, dan mudah diakses oleh pelaku IKM. Video edukasi ini berfungsi sebagai sarana pembinaan jarak jauh, sehingga IKM tetap bisa memperoleh informasi meski tidak mengikuti sosialisasi tatap muka.

	Bagi organisasi, hadirnya video edukasi ini mendukung tugas dinas dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan terkait pentingnya legalitas usaha. Dengan konten yang jelas dan visual yang menarik, IKM lebih mudah memahami langkah-langkah pengurusan izin dasar maupun izin lainnya. Hal ini memperkuat peran dinas sebagai instansi yang aktif mendorong legalitas usaha, sehingga IKM lebih terlindungi, dipercaya, dan berdaya saing. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan misi dinas untuk menumbuhkembangkan IKM yang tangguh dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha berpeluang mengakses pembiayaan, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari sisi aparatur, kegiatan ini menunjukkan pentingnya kompetensi, akuntabilitas, dan adaptasi terhadap teknologi digital. Pemanfaatan Canva untuk editing serta ChatGPT dan Gemini untuk ilustrasi menjadi bukti bahwa aparatur dapat mengoptimalkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik. Dengan demikian, manfaat kegiatan ini bukan hanya dirasakan oleh pelaku IKM yang mendapat informasi edukatif, tetapi juga memperkuat citra dinas sebagai instansi yang inovatif, adaptif, dan berkomitmen pada pembinaan industri kecil menengah di Kabupaten Kerinci.
5. Analisis Dampak jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NDS	**1) Dampak terhadap Satuan Kerja** • **Akuntabel** Jika nilai akuntabel tidak diterapkan, informasi dalam video bisa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat instansi terlihat kurang profesional karena menyampaikan materi yang tidak akurat atau tidak jelas sumbernya. Akibatnya, publik bisa meragukan kredibilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan edukasi. Kondisi ini pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan terhadap peran instansi sebagai pembina IKM. • **Kompeten** Apabila kompetensi tidak dijalankan, naskah dan

	visual video yang disusun menjadi seadanya dan tidak sesuai standar organisasi. Video yang dibuat terlihat kaku, kurang menarik, dan gagal menyampaikan pesan utama secara efektif. Hal ini menghambat pencapaian tujuan instansi dalam memberikan pembinaan yang edukatif kepada pelaku IKM. Pada akhirnya, dinas bisa dinilai tidak mampu menghasilkan media edukasi yang berkualitas. • **Berorientasi Pelayanan** Jika orientasi pelayanan diabaikan, video hanya menjadi formalitas tanpa memperhatikan manfaat nyata bagi pelaku IKM. Hasil konten bisa tidak komunikatif, membosankan, atau bahkan tidak relevan dengan kebutuhan audiens. Kondisi ini membuat instansi terkesan kurang peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Akibatnya, tujuan pelayanan publik dalam mendukung pertumbuhan IKM tidak tercapai. • **Loyal** Apabila loyalitas tidak dijaga, identitas instansi tidak akan tercermin dalam video. Logo resmi mungkin diabaikan, desain tidak konsisten, atau narasi tidak mencerminkan kebijakan dinas. Hal ini membuat instansi kehilangan kesempatan memperkuat citra positif di mata masyarakat. Lebih jauh, pimpinan dapat menilai kinerja pegawai kurang serius dalam mendukung nama baik organisasi. • **Kolaboratif** Jika sikap kolaboratif tidak dijalankan, proses penyusunan materi dan visual hanya berdasarkan satu sudut pandang. Masukan dari rekan kerja yang seharusnya memperkaya konten tidak dimanfaatkan. Akibatnya, video yang dihasilkan menjadi kurang lengkap, tidak sesuai kebutuhan, dan kualitasnya rendah. Kondisi ini membuat satuan kerja gagal menghasilkan konten yang representatif.

	• **Adaptif** Jika nilai adaptif diabaikan, konten video yang dihasilkan tidak sesuai dengan karakteristik pelaku IKM. Naskah bisa terlalu teknis, ilustrasi tidak relevan, atau gaya penyajian terlihat usang. Padahal, IKM memerlukan pendekatan sederhana dan modern agar pesan lebih mudah diterima. Akibatnya, video gagal menjangkau audiens dan terlihat tidak mengikuti perkembangan zaman. **2) Dampak terhadap Masyarakat** • **Akuntabel** Apabila akuntabilitas tidak dijaga, informasi yang diberikan bisa salah atau tidak sesuai aturan resmi. Hal ini menyesatkan pelaku IKM dalam mengurus legalitas usahanya. Dampaknya, mereka berisiko mengalami kendala hukum atau ditolak ketika mengajukan izin. Situasi ini merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. • **Kompeten** Jika kompetensi tidak diterapkan, video yang disajikan menjadi kurang jelas, visual seadanya, dan pesan tidak sampai. Pelaku IKM akan kesulitan memahami apa saja legalitas yang wajib mereka miliki. Hal ini membuat tujuan edukasi tidak tercapai dan usaha masyarakat tetap berjalan tanpa kepastian hukum. Akibatnya, mereka kehilangan peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. • **Berorientasi Pelayanan** Tanpa orientasi pelayanan, video akan terasa kaku dan tidak ramah bagi audiens. Informasi yang diberikan bisa bertele-tele atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat dari konten yang dibuat. Alih-alih membantu, video justru menambah kebingungan bagi pelaku usaha.

	• **Adaptif** Jika nilai adaptif diabaikan, video yang dibuat tidak sesuai dengan latar belakang pelaku IKM yang beragam. Konten bisa terlalu rumit, menggunakan istilah asing, atau visualnya tidak relevan. Hal ini membuat pelaku IKM enggan menonton karena merasa tidak ada manfaat yang bisa diambil. Pada akhirnya, pesan penting tentang legalitas usaha gagal tersampaikan. • **Kolaboratif** Jika kolaborasi dengan rekan kerja tidak dijalankan, video bisa tidak mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi pelaku IKM. Tanpa masukan dari rekan kerja, konten cenderung sepihak dan berisiko melewatkan informasi penting. Akibatnya, masyarakat merasa materi tidak relevan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Kondisi ini menurunkan minat audiens untuk memperhatikan video, sehingga tujuan edukasi gagal tercapai.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	Senin/08 September 2025	Konsultasi Terkait Materi dan Konsep Video Pentingnya Legalitas Usaha bagi Pelaku IKM	Disetujuinya materi dan konsep video oleh mentor	
2				
3				
4				

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Coach
1				
2				

Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-3

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

<table>
<tr><td>Judul Kegiatan</td><td colspan="2">Mempublikasikan video edukasi</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</td><td colspan="2">15 – 19 September 2025</td></tr>
<tr><td>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence</td><td colspan="2">1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor
2. Catatan hasil konsultasi
3. Dokumentasi revisi video
4. Diskusi dengan rekan kerja
5. Screenshot video yg telah dipublikasikan ke media sosial instansi
6. Screenshot video yang telah dibagikan ke grup WhatsApp IKM</td></tr>
<tr><td colspan="3">Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</td></tr>
<tr><td>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai Ber-AKHLAK</td><td colspan="2">1. Mengkoordinasikan Hasil Editing Video kepada Mentor
• Berorientasi Pelayanan
Saya mengoordinasikan hasil editing video dengan mentor karena ingin memastikan konten yang dibuat benar-benar bisa bermanfaat bagi pelaku IKM. Mentor menyarankan agar video ilustrasi yang sebelumnya saya gunakan diganti dengan menampilkan produk IKM Kerinci. Dengan adanya perubahan ini, pelaku IKM dapat merasa lebih dekat karena melihat produk nyata mereka ditampilkan dalam konten edukasi. Bagi saya, hal ini penting agar video tidak hanya berisi penjelasan umum, tetapi juga bisa memberi semangat dan kebanggaan bagi IKM lokal yang menjadi sasaran utama.
• Akuntabel
Setiap arahan yang saya terima langsung saya catat agar tidak ada yang terlewat, termasuk instruksi mengganti video dengan produk IKM Kerinci. Proses revisi saya kerjakan sesuai arahan, lalu saya konsultasikan kembali kepada mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan begitu, mentor dapat melihat bahwa</td></tr>
</table>

	perubahan yang diminta sudah benar-benar diterapkan. Dokumentasi kegiatan saya simpan sebagai bukti nyata bahwa setiap tahapan revisi dilaksanakan secara transparan. • **Harmonis** Komunikasi dengan mentor selama proses koordinasi berlangsung baik dan saling menghargai. Saya mendengarkan masukan dengan sikap terbuka dan berusaha menindaklanjutinya dengan cepat. Saat hasil revisi saya konsultasikan kembali, diskusi berjalan kondusif hingga akhirnya disetujui. Keharmonisan ini membantu proses koordinasi berjalan lancar dan penuh dukungan. • **Kompeten** Dalam pengerjaan revisi, saya belajar menyesuaikan video produk IKM Kerinci ke dalam alur narasi yang sudah ada. Saya memastikan kualitas gambar tetap baik dan alurnya tetap enak ditonton. Proses ini melatih saya untuk lebih teliti dalam mengolah konten agar terlihat relevan dan profesional. Dengan pengalaman ini, keterampilan editing saya semakin berkembang sesuai kebutuhan instansi. • **Adaptif** Saya menyesuaikan diri dengan arahan baru dari mentor, yaitu mengganti ilustrasi dengan video produk IKM Kerinci, meskipun itu cukup berbeda dari konsep awal. Saya segera mencari dan menyesuaikan materi video produk agar sesuai dengan narasi yang sudah disusun. Perubahan ini saya lihat sebagai kesempatan agar konten lebih kuat dan berdampak. Dengan sikap adaptif ini, revisi bisa selesai tepat waktu dan sesuai harapan mentor. • **Kolaboratif** Dalam melakukan revisi, saya juga melakukan diskusi dengan mentor dan rekan kerja. Kami bersama-sama menilai potongan video produk IKM Kerinci yang paling tepat untuk dimasukkan

	agar pesan dalam video lebih jelas dan menarik. Saya menerima masukan dari rekan kerja, kemudian menyesuaikannya dengan alur yang sudah ada dalam video. Dengan kerja sama ini, revisi bisa diselesaikan lebih cepat dan hasilnya lebih rapi. Kolaborasi tersebut membuat video lebih matang dan siap untuk dipublikasikan. • **Loyal** Saya menegaskan bahwa seluruh proses editing dilakukan untuk menjaga nama baik instansi, bukan sekadar kepentingan pribadi. Logo resmi, warna khas, dan identitas dinas saya pastikan tampil konsisten di video. Hal ini menjadi wujud loyalitas saya untuk menjaga citra organisasi. Dengan cara ini, publik akan mengenal video sebagai produk resmi instansi. **2. Mempublikasikan Video melalui Media Sosial Instansi** • **Berorientasi Pelayanan** Saya mempublikasikan video edukasi melalui akun resmi media sosial instansi agar informasi mengenai pentingnya legalitas usaha bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, khususnya pelaku IKM. Saya menambahkan caption singkat yang menjelaskan isi video agar audiens dapat langsung memahami inti pesan. Dengan begitu, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari informasi serupa di tempat lain. Publikasi ini saya lakukan sebagai bentuk pelayanan agar materi edukasi dapat menjangkau khalayak luas dengan cara yang praktis. • **Akuntabel** Sebelum diunggah, saya memastikan video yang dipublikasikan sama persis dengan versi yang sudah disetujui mentor. Setiap langkah publikasi saya dokumentasikan dengan tangkapan layar sebagai bukti transparansi. Hal ini membuktikan bahwa saya bertanggung jawab atas konten yang dibagikan ke masyarakat. Dengan begitu, instansi terjaga kredibilitasnya.

	• **Kompeten** Sebelum mengunggah, saya menyesuaikan format video agar kualitasnya tetap terjaga setelah dipublikasikan di media sosial. Saya juga memanfaatkan fitur-fitur platform, seperti hashtag dan deskripsi tambahan, untuk memperluas jangkauan audiens. Kemampuan ini membuat saya semakin terampil dalam memanfaatkan media digital untuk tujuan edukasi. Hal ini membuktikan peningkatan kompetensi saya di bidang publikasi. • **Adaptif** Saya memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi karena menyadari bahwa masyarakat kini lebih sering mencari informasi melalui platform digital. Dengan menyesuaikan konten ke format yang ramah media sosial, video bisa lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Saya juga belajar memahami tren penggunaan media digital agar konten tetap relevan dengan cara berkomunikasi masyarakat saat ini. Sikap adaptif ini membantu menjadikan publikasi lebih efektif dalam menjangkau audiens yang beragam. • **Kolaboratif** Dalam publikasi, saya bekerja sama dengan rekan kerja yang bertugas mengelola akun media sosial instansi. Rekan kerja membantu saya dalam proses teknis pengunggahan agar video dapat tayang dengan baik di platform resmi. Saya memastikan konten dan caption sudah siap, kemudian rekan kerja melakukan unggahan sesuai prosedur yang berlaku di instansi. Dengan adanya kerja sama ini, publikasi berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan. • **Harmonis** Saya menjaga hubungan kerja tetap baik dengan rekan kerja yang membantu dalam proses publikasi. Komunikasi dilakukan dengan saling menghargai agar kerja sama berjalan lancar. Selain itu, dalam caption saya menggunakan bahasa yang

	ramah sehingga audiens merasa nyaman menerima pesan dari instansi. Sikap harmonis ini mencerminkan bagaimana hubungan baik, baik dengan rekan kerja maupun masyarakat, dapat membuat pesan edukasi lebih mudah diterima. **3. Membagikan Video ke Grup WhatsApp IKM** • **Berorientasi Pelayanan** Saya membagikan video ke grup WhatsApp IKM dengan pesan pengantar yang sederhana agar mudah dipahami. Tujuan saya adalah memastikan semua pelaku IKM memperoleh akses langsung ke video, meski tidak aktif di media sosial. Dengan cara ini, informasi bisa lebih cepat sampai kepada sasaran utama. Hal ini menunjukkan perhatian saya terhadap kebutuhan nyata audiens. • **Adaptif** Saya memanfaatkan grup WhatsApp IKM sebagai saluran komunikasi tambahan agar video bisa diterima langsung oleh sasaran utama. WhatsApp dipilih karena lebih dekat dengan keseharian pelaku IKM yang mungkin tidak aktif di media sosial. Dengan cara ini, saya menyesuaikan penyebaran informasi sesuai kebiasaan audiens agar konten lebih mudah diterima. Nilai adaptif ini membuat pesan edukasi lebih cepat sampai dan tidak terbatas pada satu jenis platform saja. • **Kompeten** Saya menyesuaikan pesan pengantar agar sesuai dengan bahasa sehari-hari pelaku IKM. Dengan begitu, mereka merasa lebih dekat dan tidak terbebani dengan istilah yang terlalu teknis. Kemampuan berkomunikasi sederhana tetapi tepat sasaran ini merupakan bagian dari kompetensi saya sebagai penyuluh. Hal ini membantu saya menyampaikan pesan dengan efektif. • **Harmonis** Dalam membagikan video, saya menggunakan bahasa yang sopan dan ramah agar anggota grup merasa dihargai. Saya memilih kata-kata

	sederhana supaya pesan mudah dipahami tanpa menimbulkan kesan formal berlebihan. Dengan cara ini, komunikasi terasa lebih hangat dan tidak berjarak. Dengan menjaga keharmonisan komunikasi, interaksi terasa lebih personal. Hal ini membuat pelaku IKM lebih antusias menerima konten yang dibagikan.
2. Teknik Aktualisasi yang digunakan dan bukti fisik kegiatan / *evidence*	**1) Mengkoordinasikan Hasil Editing Video kepada Mentor** Teknik yang digunakan adalah konsultasi hasil editing video dengan mentor. Pada tahap awal, saya menunjukkan hasil video yang sudah diedit, kemudian menerima masukan berupa arahan untuk mengganti ilustrasi dengan video produk IKM Kerinci agar konten lebih relevan bagi pelaku IKM. Saya melakukan revisi sesuai arahan tersebut, lalu mengoordinasikannya kembali hingga akhirnya video dinyatakan sesuai dan disetujui (ACC). Proses ini memastikan video yang dipublikasikan benar-benar tepat sasaran dan memenuhi standar instansi.  **Gambar 1. Melakukan Konsultasi Hasil Editing Video kepada Mentor**

Nama : Venisa Putri, S Psi
NIP : 2003033120250420001
NDH : A10.4.40
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
Mentor : Ir. Raswan Putra, M.Si

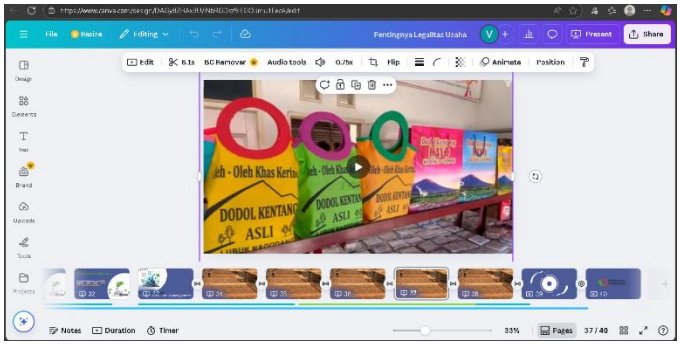
Pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, saya telah melakukan konsultasi dengan mentor terkait video yang telah diedit

Catatan Konsultasi:

Kerinci, 16 September 2025
Mentor

Ir. Raswan Putra, M.Si
NIP. 196806011993031010

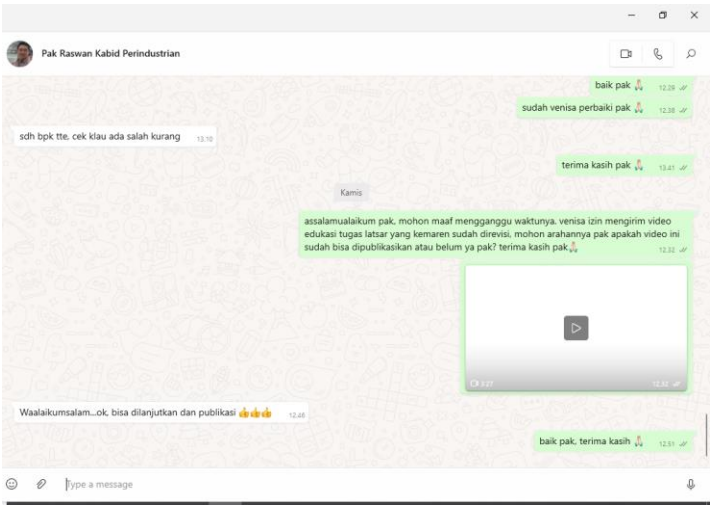
Gambar 2. Catatan Hasil Konsultasi



Gambar 3. Melakukan Revisi Video



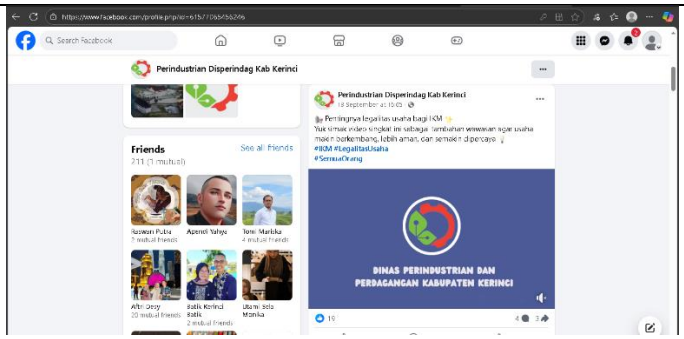
Gambar 4. Diskusi dengan Rekan Kerja



Gambar 5. Melakukan Konsultasi Hasil Revisi Video kepada Mentor

2) Mempublikasikan Video melalui Media Sosial Instansi

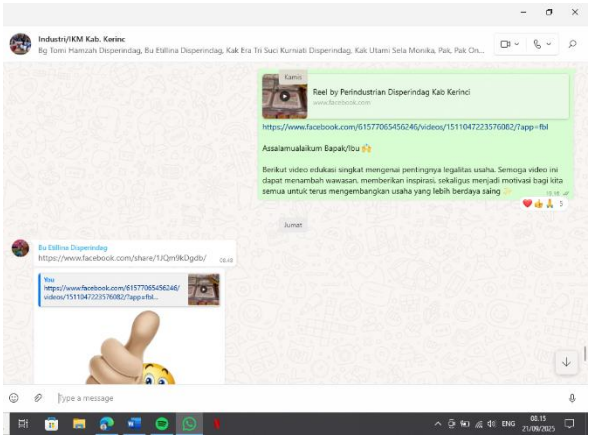
Teknik yang digunakan adalah publikasi digital melalui akun resmi media sosial instansi. Saya menyiapkan caption singkat yang komunikatif agar audiens langsung memahami isi video. Proses publikasi dilakukan dengan bekerja sama bersama rekan kerja yang bertugas mengelola akun media sosial instansi sehingga unggahan dapat dilakukan sesuai prosedur dan tampak rapi. Dengan cara ini, informasi mengenai legalitas usaha dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.



Gambar 6. Mempublikasikan Konten Edukasi Pada Akun Resmi Media Sosial Instansi

3) Membagikan Video ke Grup WhatsApp IKM

Teknik yang digunakan adalah distribusi konten secara langsung melalui grup WhatsApp IKM. Saya membagikan video yang sudah dipublikasikan dengan menyertakan pesan pengantar sederhana agar mudah dipahami oleh anggota grup. Cara ini dipilih karena WhatsApp merupakan media komunikasi sehari-hari yang lebih cepat diakses oleh pelaku IKM dibandingkan platform lain. Dengan demikian, informasi dapat diterima secara langsung oleh sasaran utama.



Gambar 7. Membagikan Video ke Grup WhatsApp IKM.

3. Deskripsi Proses dan Kualitas Kegiatan

1) Mengkoordinasikan Hasil Editing Video kepada Mentor

Pada tahap ini, saya mengkonsultasikan hasil editing video edukasi kepada mentor untuk mendapatkan masukan dan arahan. Dari koordinasi tersebut, mentor menyarankan agar video ilustrasi yang digunakan sebelumnya diganti dengan menampilkan

	produk IKM Kerinci. Hal ini dianggap penting karena akan membuat konten lebih relevan dan dekat dengan pelaku IKM, dibandingkan hanya menampilkan ilustrasi umum. Saya kemudian melakukan revisi sesuai arahan dengan menambahkan potongan video produk yang sesuai konteks. Setelah revisi selesai, saya kembali mengonsultasikan hasilnya hingga akhirnya video dinyatakan sesuai dan disetujui (ACC). Dari kegiatan ini saya belajar bahwa kualitas konten edukasi tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis editing, tetapi juga pada relevansi materi dengan kondisi nyata pelaku IKM, sehingga video yang dihasilkan benar-benar bisa bermanfaat bagi audiens. **2) Mempublikasikan Video melalui Media Sosial Instansi** Setelah mendapatkan persetujuan, saya mempublikasikan video melalui akun resmi media sosial instansi. Sebelum diunggah, saya menyiapkan caption singkat dengan bahasa yang komunikatif agar audiens dapat langsung memahami pesan yang disampaikan. Proses unggah dilakukan dengan bekerja sama dengan rekan kerja yang mengelola akun media sosial instansi sehingga konten dapat dipublikasikan sesuai prosedur dan tampak profesional. Dalam publikasi ini, saya juga memastikan identitas instansi tetap ditampilkan secara konsisten melalui logo resmi dan gaya komunikasi yang selaras dengan citra organisasi. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa publikasi bukan sekadar membagikan konten, tetapi juga menjaga kredibilitas instansi di mata masyarakat. Dengan demikian, pesan edukasi mengenai legalitas usaha dapat diterima dengan lebih baik dan memberi dampak positif bagi pelaku IKM. **3) Membagikan Video ke Grup WhatsApp IKM** Tahap selanjutnya adalah menyebarkan video ke grup WhatsApp IKM agar informasi lebih mudah diakses secara langsung oleh pelaku usaha. Saya membagikan video dengan menyertakan pesan

	pengantar singkat yang menggunakan bahasa sopan, ramah, dan sederhana, sehingga anggota grup dapat langsung memahami tujuan dari video tersebut. Pemilihan WhatsApp sebagai media distribusi dianggap efektif karena aplikasi ini digunakan sehari-hari oleh pelaku IKM, sehingga peluang video untuk dilihat lebih besar. Proses ini juga membantu menjangkau audiens yang mungkin tidak aktif mengikuti media sosial instansi. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa penggunaan media komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat sangat penting agar pesan edukasi dapat sampai dengan cepat, lebih personal, dan meninggalkan kesan positif.
4. Manfaat Kegiatan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi	Kegiatan pada minggu ke-3 ini memberikan manfaat nyata dalam mendukung visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci. Melalui koordinasi hasil editing, publikasi video di media sosial, hingga distribusi konten melalui grup WhatsApp IKM, saya berkontribusi menghadirkan media edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran video edukasi yang menampilkan produk IKM Kerinci juga memberi nilai tambah, karena pelaku usaha dapat melihat langsung contoh nyata dari produk mereka sendiri yang diangkat dalam konten. Dengan begitu, edukasi terasa lebih relevan, membangkitkan kebanggaan lokal, sekaligus memberi dorongan agar IKM semakin serius mengurus legalitas usaha. Bagi organisasi, kegiatan ini memperkuat peran dinas dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pentingnya legalitas usaha. Publikasi di media sosial menjadikan informasi mudah dijangkau oleh khalayak luas, sementara distribusi melalui WhatsApp memastikan pesan edukasi sampai langsung kepada sasaran utama. Hal ini mendukung tugas dinas dalam memberikan fasilitasi, pelayanan, dan pembinaan IKM secara lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan misi dinas untuk menumbuhkembangkan IKM yang tangguh dan mampu bersaing. Dengan memahami pentingnya

	legalitas, pelaku usaha dapat membuka akses terhadap pembiayaan, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari sisi internal organisasi, kegiatan ini turut memperkuat kerja sama antarpegawai, khususnya dalam mendukung publikasi layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sinergi yang terjalin membuat proses penyebaran informasi lebih efektif dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam melayani publik. Dengan demikian, manfaat kegiatan ini bukan hanya dirasakan oleh pelaku IKM yang memperoleh informasi edukatif, tetapi juga memperkuat citra dinas sebagai instansi yang inovatif, adaptif, dan konsisten dalam mendorong tumbuhnya industri kecil menengah di Kabupaten Kerinci.
5. Analisis Dampak jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NDS	**1) Dampak terhadap Satuan Kerja** • **Akuntabel** Apabila nilai akuntabel tidak dijalankan, proses revisi dan publikasi video tidak bisa dipertanggungjawabkan. Konten yang dipublikasikan berisiko menampilkan informasi yang keliru atau tidak sesuai arahan pimpinan. Kondisi ini membuat instansi terlihat kurang profesional dalam memberikan edukasi. Akibatnya, kepercayaan pimpinan maupun masyarakat terhadap kinerja organisasi menurun. • **Kompeten** Jika kompetensi tidak diterapkan, kualitas editing dan publikasi video menjadi seadanya dan jauh dari standar. Hasilnya, konten terlihat kaku, visual kurang menarik, dan pesan utama tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini menghambat pencapaian tugas dinas dalam memberikan pembinaan melalui media digital. Pada akhirnya, instansi bisa dianggap tidak mampu menghasilkan media edukasi yang berkualitas. • **Berorientasi Pelayanan** Tanpa orientasi pelayanan, publikasi video hanya menjadi formalitas tanpa memperhatikan kebutuhan pelaku IKM. Konten yang disebarkan

	bisa tidak komunikatif, membosankan, atau bahkan tidak relevan dengan kondisi masyarakat. Hal ini membuat satuan kerja terkesan kurang peduli dalam memberikan pelayanan. Akibatnya, tujuan organisasi untuk memberikan fasilitasi dan edukasi yang bermanfaat tidak tercapai. • **Loyal** Apabila loyalitas tidak dijaga, video yang dipublikasikan berisiko kehilangan identitas organisasi. Logo resmi instansi bisa tidak ditampilkan, atau gaya komunikasi tidak sesuai dengan visi misi dinas. Kondisi ini melemahkan citra positif instansi di mata publik. Lebih jauh lagi, pimpinan bisa menilai pegawai kurang serius mendukung nama baik organisasi. • **Harmonis** Apabila sikap harmonis tidak diterapkan, komunikasi internal dengan rekan kerja maupun mentor bisa terganggu. Perbedaan pendapat yang seharusnya bisa didiskusikan dengan baik justru bisa menimbulkan ketegangan. Hal ini dapat menghambat proses revisi video, karena arahan dari mentor tidak ditindaklanjuti dengan sikap terbuka. Akibatnya, kualitas konten menurun dan produk akhir tidak sesuai standar organisasi. • **Kolaboratif** Apabila kolaborasi tidak dilakukan, publikasi video hanya mengandalkan satu pihak tanpa dukungan dari mentor dan rekan kerja yang mengelola media sosial instansi. Akibatnya, proses unggah bisa tidak sesuai prosedur dan hasil publikasi terlihat kurang rapi. Konten yang dihasilkan juga bisa melewatkan masukan berharga dari pegawai lain. Kondisi ini membuat satuan kerja gagal menampilkan citra yang solid di mata masyarakat. • **Adaptif** Jika nilai adaptif diabaikan, proses revisi dan publikasi video tidak akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Konten bisa terasa

	usang, gaya komunikasi tidak mengikuti tren digital, atau penyajiannya tidak sesuai dengan karakteristik pelaku IKM. Hal ini membuat media edukasi sulit menarik perhatian audiens. Akibatnya, satuan kerja gagal menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman. **2) Dampak terhadap Masyarakat** • **Akuntabel** Jika akuntabilitas diabaikan, informasi yang diberikan melalui video bisa tidak sesuai aturan resmi. Hal ini menyesatkan pelaku IKM ketika ingin mengurus legalitas usaha. Mereka berisiko mengalami kendala hukum atau penolakan ketika mengajukan izin. Kondisi ini merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap instansi pemerintah. • **Kompeten** Tanpa kompetensi, video yang disebarkan tidak jelas alurnya, visual seadanya, dan pesan utama tidak sampai. Pelaku IKM akan kesulitan memahami langkah-langkah pengurusan legalitas usaha. Hal ini membuat tujuan edukasi gagal tercapai, dan usaha masyarakat tetap berjalan tanpa kepastian hukum. Pada akhirnya, pelaku usaha kehilangan peluang berkembang secara berkelanjutan. • **Berorientasi Pelayanan** Jika nilai pelayanan diabaikan, konten terasa kaku dan tidak ramah bagi audiens. Video yang dipublikasikan bisa terlalu panjang, bertele-tele, atau bahkan tidak sesuai kebutuhan pelaku IKM. Hal ini membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat dari konten yang dibuat. Alih-alih membantu, video justru menambah kebingungan bagi pelaku usaha. • **Adaptif** Apabila sikap adaptif tidak diterapkan, konten yang dibagikan tidak sesuai dengan karakteristik pelaku IKM yang beragam. Penyajian bisa terlalu

	rumit, menggunakan istilah teknis, atau gaya komunikasi yang tidak relevan. Hal ini membuat masyarakat enggan menonton video karena merasa tidak ada manfaat yang bisa diambil. Akibatnya, pesan penting mengenai legalitas usaha gagal tersampaikan. • **Harmonis** Jika harmonis tidak diterapkan, cara penyampaian video bisa terasa kaku dan tidak nyaman ditonton. Misalnya, penggunaan bahasa pengantar yang terlalu formal atau visual yang tidak serasi. Kondisi ini membuat audiens cepat bosan dan meninggalkan video sebelum selesai. Akhirnya, pesan penting terkait legalitas usaha tidak sampai ke sasaran. • **Kolaboratif** Apabila kolaborasi dalam proses penyusunan dan publikasi diabaikan, konten bisa tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku IKM. Tanpa masukan dari pihak lain, video menjadi sepihak dan melewatkan informasi penting. Hal ini membuat masyarakat merasa materi tidak relevan dengan kondisi sehari-hari mereka. Pada akhirnya, minat audiens untuk memperhatikan video menurun, dan tujuan edukasi gagal tercapai. • **Loyal** Jika nilai loyal tidak dijaga, video yang diterima masyarakat berisiko kehilangan identitas resmi instansi. Tanpa logo dan gaya komunikasi yang konsisten, masyarakat bisa meragukan apakah konten benar-benar berasal dari dinas. Hal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sumber informasi. Akibatnya, peran instansi sebagai pembina dan fasilitator IKM menjadi kurang diakui.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	Selasa/16 September 2025	Konsultasi Terkait Video yang Telah Diedit	Revisi dengan menambahkan video produk IKM kerinci	
2	Kamis/18 September 2025	Konsultasi Terkait Video yang Telah Direvisi	Disetujuinya video untuk dipublikasikan olehmentor	
3				
4				

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Coach
1				
2				

Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-4

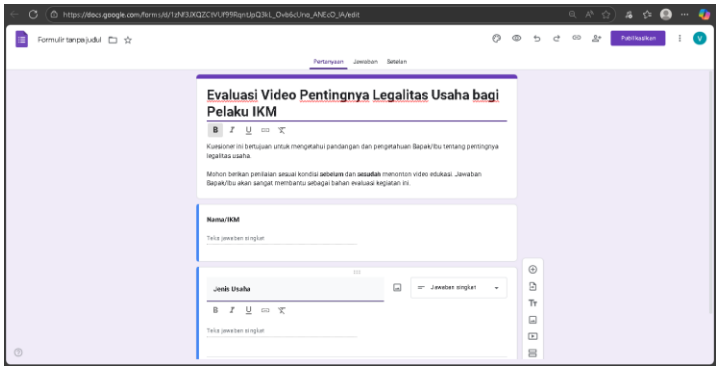
a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

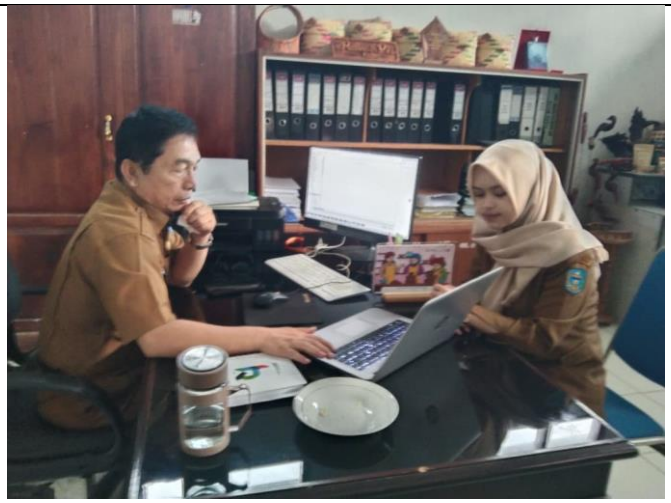
<table>
<tr><td>Judul Kegiatan</td><td colspan="2">Melakukan evaluasi pemahaman pada pelaku IKM.</td></tr>
<tr><td>Tanggal Pelaksanaan Kegiatan</td><td colspan="2">22 – 26 September 2025</td></tr>
<tr><td>Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / Evidence</td><td colspan="2">1. Dokumentasi menyusun kuesioner menggunakan google form
2. Dokumentasi mengkonsultasikan kuesioner kepada mentor
3. Catatan hasil konsultasi
4. Dokumentasi merevisi kuesioner sesuai masukan mentor
5. Dokumentasi menyebarkan kuesioner kepada pelaku IKM melalui grup WhatsApp
6. Dokumentasi kuesioner yang telah diisi oleh pelaku IKM
7. Dokumentasi analisis hasil kuesioner
8. Dokumentasi penyusunan laporan hasil evaluasi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan</td></tr>
<tr><td>1. Uraian kegiatan yang memuat nilai Ber-AKHLAK</td><td colspan="2">1) Menyusun kuesioner menggunakan google form untuk mengukur pemahaman pelaku IKM, serta mengkonsultasikannya kepada mentor
• Kompeten
Pada tahap awal, saya menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner menggunakan Google Form. Setiap pernyataan saya rancang berdasarkan materi inti yang disampaikan dalam video edukasi mengenai legalitas usaha. Saya memastikan kalimat yang digunakan sederhana, jelas, dan tidak bertele-tele agar dapat dipahami oleh pelaku IKM dengan berbagai latar belakang pendidikan. Dengan menyusun kuesioner secara terarah, saya berupaya agar hasil evaluasi benar-benar dapat menggambarkan sejauh mana pemahaman peserta meningkat setelah menonton video.</td></tr>
</table>

	• **Akuntabel** Setelah kuesioner selesai disusun, saya mengonsultasikannya kepada mentor untuk memastikan kesesuaian isi dengan tujuan evaluasi. Dari proses diskusi ini, saya memperoleh masukan, seperti perlunya memperjelas beberapa pernyataan dan menambah variasi jawaban jenis usaha agar lebih mudah dipahami oleh pelaku IKM. Semua masukan tersebut segera saya tindaklanjuti dengan melakukan revisi langsung pada *Google Form*. Setiap perubahan saya dokumentasikan sehingga proses penyusunan instrumen bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. • **Adaptif** Dalam proses penyusunan, saya memanfaatkan *Google Form* untuk memudahkan pengolahan pernyataan yang harus diisi dan revisi kuesioner. Saya menyesuaikan kalimat maupun pilihan jawaban sesuai saran mentor tanpa harus membuat ulang instrumen dari awal. Fitur *Google Form* memungkinkan revisi secara cepat tanpa mengubah struktur keseluruhan instrumen. Dengan pemanfaatan *Google Form* ini membantu saya menyiapkan kuesioner yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengefisienkan waktu penyusunan. • **Loyal** Selama proses penyusunan, saya menyadari bahwa kuesioner ini bukan hanya untuk kepentingan laporan pribadi, tetapi juga bagian dari program resmi instansi. Karena itu, saya mencantumkan identitas dinas pada bagian judul maupun deskripsi kuesioner agar responden mengetahui sumbernya secara jelas. Hal ini menunjukkan bentuk loyalitas saya dalam menjaga nama baik organisasi melalui setiap instrumen yang dikeluarkan. • **Kolaboratif** Dalam penyusunan kuesioner, saya berkolaborasi dengan mentor untuk menilai kesesuaian indikator dengan tujuan evaluasi dan

	konteks pembinaan IKM. Saya juga meminta pendapat rekan kerja terkait kejelasan bahasa dan kelayakan pertanyaan agar responden mudah memahami setiap item. Kolaborasi ini membantu memperbaiki redaksi pernyataan yang kurang tepat serta memastikan kuesioner mencakup seluruh aspek penting yang ingin diukur. Dengan adanya kerja sama ini, instrumen evaluasi menjadi lebih valid, relevan, dan siap digunakan dalam proses pengumpulan data\ **2) Menyebarkan kuesioner menggunakan *google form* kepada pelaku IKM** • **Berorientasi Pelayanan** Setelah kuesioner tersebut direvisi, kemudian saya mulai menyebarkannya kepada pelaku IKM yang menjadi sasaran kegiatan. Dalam menyebarkan kuesioner, saya menggunakan cara yang mudah diakses pelaku IKM, yaitu melalui *Google Form* yang dibagikan di grup WhatsApp. Dengan langkah ini, mereka dapat mengisi kapan saja sesuai waktu luang tanpa terbebani. Pesan pengantar dibuat singkat, jelas, dan ramah agar tidak menimbulkan kesan memaksa. Hal tersebut menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan responden agar merasa dilayani dengan baik. • **Harmonis** Dalam mengajak pelaku IKM mengisi kuesioner, saya menjaga penggunaan bahasa agar tetap sopan dan santun. Saya tidak menggunakan kalimat yang memaksa, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif yang hangat. Dengan sikap ini, hubungan komunikasi tetap terjaga baik, responden merasa dihormati, dan partisipasi bisa diperoleh secara sukarela tanpa menimbulkan rasa terpaksa. Sikap harmonis ini menjadikan suasana lebih nyaman sehingga responden bersedia berpartisipasi dengan sukarela. • **Adaptif** Dalam penyebaran kuesioner, saya

	memanfaatkan grup WhatsApp yang sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari pelaku IKM. Penyesuaian ini membuat kuesioner lebih mudah dijangkau dan meningkatkan tingkat partisipasi. Dengan cara ini, proses distribusi kuesioner tetap fleksibel dan efektif sesuai kebiasaan responden. **3) Menganalisis hasil evaluasi & membuat laporan** • **Kompeten** Setelah kuesioner selesai diisi oleh pelaku IKM, seluruh data didownload dalam bentuk *spreadsheet*. Data diperiksa dengan teliti untuk memastikan tidak ada jawaban yang terlewat atau salah input. Setiap jawaban direkap dan dihitung nilai rata-ratanya untuk melihat perubahan pemahaman dibandingkan evaluasi sebelumnya. Analisis ini memastikan laporan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara nyata dan transparan. • **Akuntabel** Setelah seluruh data hasil kuesioner terkumpul dan selesai dianalisis, saya kemudian menyusun laporan evaluasi secara sistematis dan terstruktur. Laporan tersebut tidak hanya berisi angka, tetapi juga dilengkapi penjelasan naratif agar mudah dipahami oleh pihak dinas maupun mentor. Setiap kesimpulan yang saya tuliskan selalu didukung dengan data nyata, sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan cara ini, laporan evaluasi menjadi dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai acuan perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang. • **Adaptif** Dalam proses analisis, saya menggunakan *Google Spreadsheet* untuk memudahkan pengolahan data kuesioner. Jika terdapat jawaban yang sulit dianalisis atau membutuhkan perhitungan tambahan, spreadsheet memungkinkan saya menyesuaikan rumus dan format secara cepat. Penyesuaian ini dilakukan

	agar data yang disajikan tetap akurat sekaligus mudah dipahami oleh mentor dan pihak terkait. Dengan memanfaatkan fitur *Google Spreadsheet* secara adaptif, laporan menjadi lebih komunikatif dan sesuai kebutuhan pembinaan di lapangan. • **Berorientasi Pelayanan** Setelah analisis selesai, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk persentase dan uraian naratif singkat agar mudah dipahami. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki strategi pembinaan IKM sehingga lebih tepat sasaran. Dengan cara ini, evaluasi tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku IKM maupun instansi.
2. Teknik Aktualisasi yang digunakan dan bukti fisik kegiatan / *evidence*	**1) Menyusun dan Mengkonsultasikan Kuesioner** Teknik yang digunakan adalah penyusunan instrumen evaluasi berbasis digital melalui *Google Form* serta konsultasi dengan mentor. Pada tahap awal, saya merancang daftar pernyataan yang sesuai dengan materi edukasi. Setelah selesai, instrumen saya konsultasikan kepada mentor untuk memastikan butir pernyataan jelas, relevan, dan sesuai dengan tujuan evaluasi. Dari hasil konsultasi, terdapat saran untuk mengubah format pernyataan serta menambahkan opsi jawaban jenis usaha agar kuesioner lebih mudah dipahami oleh pelaku IKM. Proses ini memastikan instrumen yang digunakan benar-benar valid sebagai alat ukur pemahaman.  **Gambar 1. Penyusunan Kuesioner dengan *Google Form***



Gambar 2. Konsultasi Kuesioner dengan Mentor

Nama : Venisa Putri, S.Psi
NIP : 200303312025042001
NDH : A10.4.40
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
Mentor : Ir. Raswan Putra, M.Si

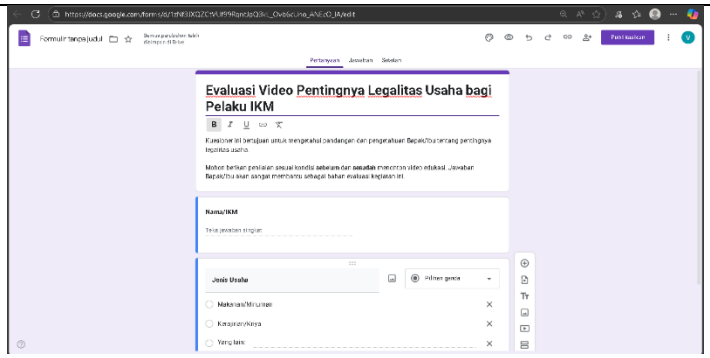
Pada hari Senin tanggal 22 September 2025, saya telah melakukan konsultasi dengan mentor terkait kuesioner yang telah disusun.
Catatan Konsultasi:

Mentor memberikan masukan berupa bagian salah satu pertanyaan kuesioner pada "Jenis Usaha" untuk ditambahkan beberapa pilihan jawaban agar lebih mewakili variasi usaha yang di jalankan oleh pelaku usaha.

Kerinci, 22 September 2025
Mentor

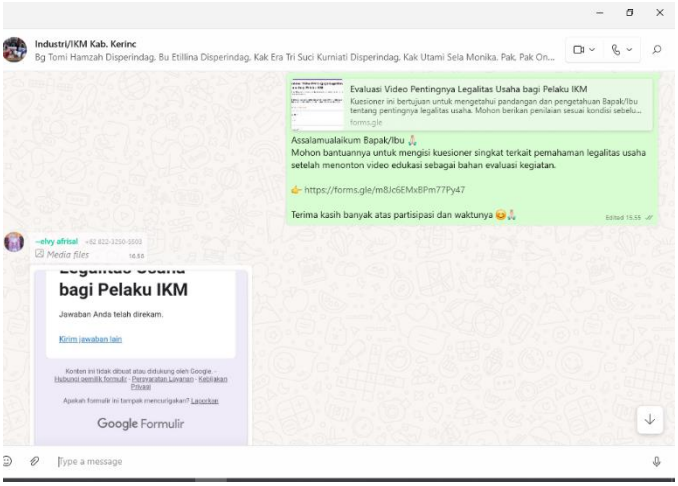
Ir. Raswan Putra, M.Si
NIP. 196806011993031010

Gambar 3. Catatan Hasil Konsultasi



Gambar 4. Revisi Kuesioner sesuai Masukan Mentor

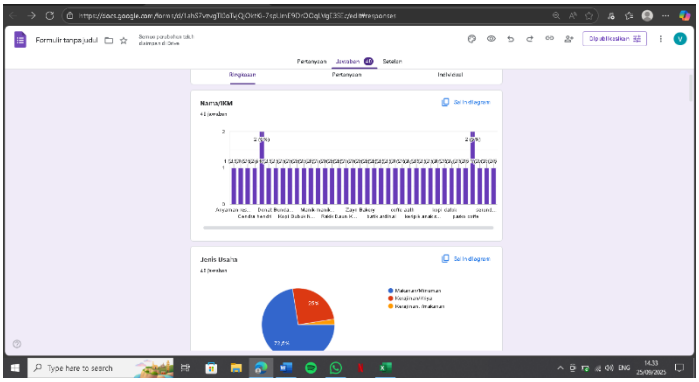
2) **Menyebarkan Kuesioner kepada Pelaku IKM**
Teknik yang digunakan adalah distribusi instrumen evaluasi melalui media komunikasi digital yang dekat dengan keseharian pelaku IKM, yaitu WhatsApp. Kuesioner yang sudah final dibagikan ke grup WhatsApp IKM dengan menyertakan pesan pengantar yang sopan dan ramah, sehingga partisipasi responden terasa ringan dan tidak memberatkan. Cara ini dipilih karena WhatsApp merupakan media komunikasi yang efektif, cepat, dan sudah terbiasa digunakan oleh responden. Dengan demikian, penyebaran instrumen berjalan lancar dan lebih mudah dijangkau oleh sasaran utama.



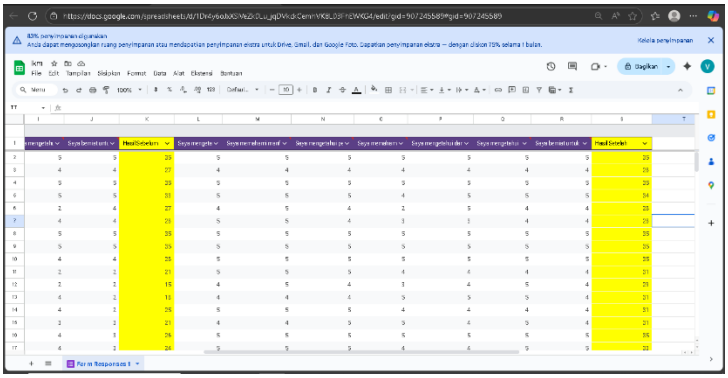
Gambar 5. Penyebaran Kuesioner melalui Grup WhatsApp IKM

3) Menganalisis dan Menyusun Laporan Hasil Evaluasi

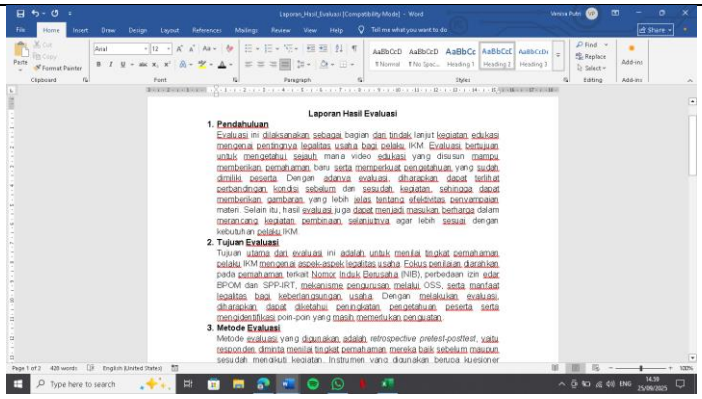
Teknik yang digunakan adalah analisis data secara sistematis terhadap jawaban yang masuk, kemudian disusun dalam bentuk laporan transparan. Data didownload dari *Google Form* dalam bentuk spreadsheet, diperiksa untuk memastikan tidak ada jawaban yang terlewat, dan dihitung nilai rata-ratanya untuk melihat perubahan pemahaman pelaku IKM dibandingkan evaluasi sebelumnya. Analisis ini menggunakan *Google Spreadsheet* agar perhitungan lebih akurat, fleksibel, dan mudah disesuaikan bila ada data tambahan. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang memuat identitas instansi, sehingga jelas bahwa kegiatan ini bagian dari program organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 6. Hasil Kuesioner yang Telah Diisi



Gambar 7. Dokumentasi Analisis Hasil Kuesioner

	 **Gambar 8. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi**
3. Deskripsi Proses dan Kualitas Kegiatan	**1) Menyusun dan Mengkonsultasikan Kuesioner** Pada tahap ini, saya menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner yang berisi pernyataan sesuai materi edukasi. Setelah selesai, saya mengonsultasikannya kepada mentor untuk memperoleh masukan. Dari hasil diskusi, terdapat beberapa saran perbaikan yang kemudian saya terapkan agar instrumen lebih sederhana dan sesuai dengan kondisi responden. Proses ini menunjukkan bahwa kualitas evaluasi memerlukan ketelitian dalam penyusunan serta keterbukaan terhadap masukan dari pihak lain. **2) Menyebarkan Kuesioner kepada Pelaku IKM** Kuesioner yang sudah final kemudian saya sebarkan kepada pelaku IKM melalui grup WhatsApp. Media ini dipilih karena mudah diakses, cepat, dan sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari pelaku usaha. Saya menyertakan pesan pengantar yang sopan dan ramah, agar pelaku IKM merasa nyaman untuk berpartisipasi. Dari tahap ini terlihat bahwa keberhasilan evaluasi bukan hanya bergantung pada isi pernyataan, tetapi juga pada cara penyampaian yang memperhatikan pelayanan dan komunikasi yang baik. **3) Menganalisis dan Melaporkan Hasil Evaluasi** Data kuesioner dianalisis menggunakan *Google Spreadsheet* untuk mempermudah perhitungan, perbandingan rata-rata, dan visualisasi hasil. Nilai rata-rata dibandingkan dengan evaluasi sebelumnya untuk mengetahui perubahan pemahaman. Hasil

	analisis kemudian disajikan dalam bentuk persentase dan uraian naratif singkat agar mudah dipahami oleh mentor dan pihak terkait. Laporan disusun secara rapi dan transparan, menunjukkan ketelitian, kompetensi, dan loyalitas terhadap organisasi.
4. Manfaat Kegiatan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi	Kegiatan evaluasi pemahaman pelaku IKM memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya visi "Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Lebih Baik". Data yang diperoleh dari kuesioner memungkinkan instansi menilai efektivitas penyampaian materi edukasi sekaligus mengidentifikasi materi yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, pembinaan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan pelaku IKM. Kegiatan ini secara langsung mendukung Misi 1, yaitu meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur melalui pengelolaan evaluasi yang profesional, serta Misi 2, yaitu menumbuhkembangkan IKM yang tangguh dan berdaya saing. Dari sisi internal organisasi, kegiatan ini mencerminkan nilai Pelayanan Prima dan Akuntabilitas karena setiap tahapan, mulai dari penyusunan kuesioner hingga laporan hasil evaluasi, dilaksanakan secara teliti, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses evaluasi yang terstruktur juga menunjukkan penerapan Integritas dan Tata Kelola, di mana data dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan dengan jujur tanpa manipulasi, memperkuat profesionalisme dan kredibilitas instansi. Kegiatan ini sekaligus mendukung Inovasi dan Digitalisasi, karena pemanfaatan *Google Form* dan grup WhatsApp mempermudah penyebaran kuesioner dan pengolahan data secara efisien. Hal ini mempermudah partisipasi pelaku IKM sekaligus meningkatkan kualitas laporan, sehingga informasi dapat digunakan untuk perencanaan pembinaan berbasis digital dan data-driven. Selain itu, evaluasi ini memperkuat Kolaborasi dan Kemitraan, karena melalui koordinasi dengan mentor dan interaksi dengan pelaku IKM, tercipta komunikasi dua arah yang konstruktif. Pelibatan berbagai pihak ini meningkatkan kualitas program pembinaan dan memastikan program yang diberikan benar-benar bermanfaat. Kegiatan ini juga sejalan dengan nilai Keberlanjutan dan Ketahanan Ekonomi,

	karena pemahaman pelaku IKM terhadap legalitas usaha akan mendukung pertumbuhan usaha yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi.
5. Analisis Dampak jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NDS	**1) Dampak terhadap Satuan Kerja** • **Akuntabel** Apabila akuntabilitas tidak diterapkan, proses evaluasi berisiko tidak dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen yang dibuat bisa dianggap asal, dan laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi nyata. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas instansi di mata pimpinan maupun masyarakat. Akibatnya, organisasi dinilai kurang profesional dalam melaksanakan pembinaan. • **Kompeten** Jika kompetensi diabaikan, instrumen evaluasi bisa tidak relevan dengan materi yang telah diberikan. Pernyataan yang disusun bisa terlalu rumit atau justru keluar dari topik, sehingga hasilnya tidak bermanfaat. Kondisi ini membuat tujuan evaluasi gagal tercapai. Pada akhirnya, instansi akan kesulitan dalam mengukur efektivitas program yang dijalankan. • **Berorientasi Pelayanan** Tanpa orientasi pelayanan, penyebaran kuesioner bisa terasa memberatkan bagi pelaku IKM. Instrumen mungkin tidak mudah diakses, atau penyampaiannya kurang ramah. Hal ini membuat partisipasi responden menurun dan data yang diperoleh tidak maksimal. Akibatnya, tujuan organisasi untuk memberikan pembinaan yang bermanfaat tidak tercapai dengan baik. • **Loyal** Apabila loyalitas diabaikan, hasil evaluasi berisiko kehilangan identitas resmi instansi. Laporan yang dibuat bisa tampak tidak mewakili organisasi, sehingga melemahkan citra positif dinas. Pimpinan pun dapat menilai bahwa pegawai kurang serius mendukung nama baik

	organisasi. Hal ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap instansi. • **Harmonis** Tanpa sikap harmonis, komunikasi dengan mentor maupun pelaku IKM dapat terganggu. Ajakan mengisi kuesioner bisa dianggap memaksa, atau masukan dari mentor tidak diterima dengan baik. Hal ini akan menghambat jalannya kegiatan evaluasi. Akibatnya, kualitas laporan yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. • **Adaptif** Apabila nilai adaptif tidak dijalankan, instrumen tidak akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata. Pernyataan bisa terasa kaku, rumit, atau bahkan tidak sesuai dengan tingkat pemahaman pelaku IKM. Hal ini membuat data yang terkumpul tidak relevan. Akibatnya, organisasi gagal menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan. **2) Dampak terhadap Masyarakat** • **Akuntabel** Jika akuntabilitas diabaikan, masyarakat bisa menerima hasil evaluasi yang tidak sesuai fakta. Informasi yang salah dapat menyesatkan pelaku IKM ketika memahami materi legalitas usaha. Kondisi ini merugikan mereka karena dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahan langkah dalam mengurus izin. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap instansi akan menurun. • **Kompeten** Tanpa kompetensi, kuesioner yang dibagikan bisa membingungkan responden. Pernyataan yang terlalu sulit atau tidak relevan membuat pelaku IKM enggan menjawab dengan serius. Hasilnya, data yang terkumpul tidak bermanfaat untuk pembinaan. Hal ini membuat masyarakat merasa kegiatan evaluasi hanya formalitas belaka.

	• **Berorientasi Pelayanan** Apabila orientasi pelayanan tidak dijalankan, masyarakat merasa tidak dipermudah dalam berpartisipasi. Instrumen mungkin sulit diakses atau tidak praktis untuk diisi. Akibatnya, partisipasi masyarakat menurun dan hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini membuat masyarakat enggan terlibat pada kegiatan berikutnya. • **Loyal** Tanpa loyalitas, laporan hasil evaluasi yang diterima masyarakat bisa kehilangan identitas instansi. Mereka bisa meragukan apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan oleh dinas. Hal ini membuat masyarakat kurang percaya terhadap peran instansi sebagai pembina IKM. Pada akhirnya, hubungan masyarakat dengan instansi menjadi renggang. • **Harmonis** Jika sikap harmonis tidak diterapkan, ajakan mengisi kuesioner bisa dirasakan kaku dan tidak ramah. Masyarakat mungkin merasa partisipasi yang mereka berikan tidak dihargai. Hal ini dapat menimbulkan kesan negatif terhadap instansi. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam kegiatan pembinaan berikutnya berkurang. • **Adaptif** Jika adaptif tidak diterapkan, kuesioner akan terasa kaku dan tidak sesuai dengan karakteristik pelaku IKM. Pernyataan yang dibuat bisa terlalu teknis atau sulit dimengerti. Hal ini membuat masyarakat malas untuk berpartisipasi. Akibatnya, hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi lapangan dan program pembinaan menjadi kurang efektif.

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	Senin/22 September 2025	Konsultasi Terkait Kuesioner yang Telah Disusun	Disetujuinya kuesioner yang siap dibagikan kepada pelaku IKM oleh mentor	
2				
3				
4				

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Coach
1				
2				

Lampiran Laporan Mingguan Minggu Ke-5

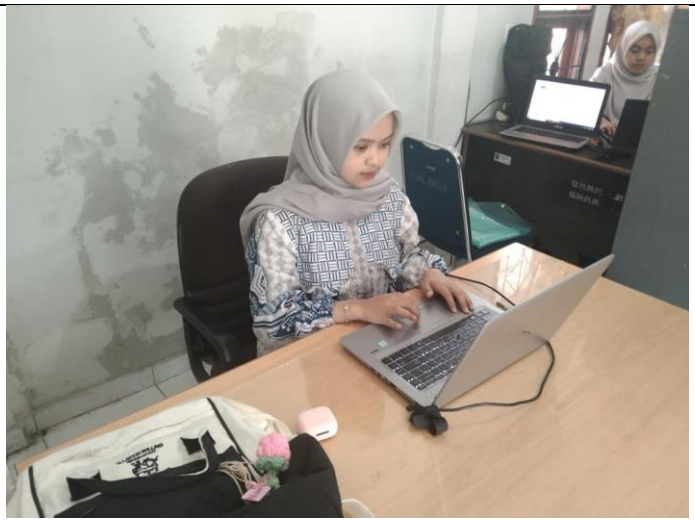
a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

Judul Kegiatan	Membuat laporan hasil aktualisasi
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	29 September 2025 – 06 Oktober 2025
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan / *Evidence*	1. Dokumentasi pengumpulan data dan dokumentasi pendukung 2. Dokumentasi penyusunan draft laporan aktualisasi 3. Dokumentasi konsultasi laporan aktualisasi dengan mentor 4. Catatan hasil konsultasi 5. Dokumentasi laporan aktualisasi yang telah difinalisasi dan ditandatangani mentor
Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan	
1. Uraian kegiatan yang memuat nilai Ber-AKHLAK	**1) Menyusun laporan aktualisasi** • **Kompeten** Pada minggu ini, penyusunan laporan aktualisasi mulai saya lakukan dengan mengompilasi seluruh hasil kegiatan yang sudah berjalan, baik berupa foto dokumentasi, hasil evaluasi, maupun laporan mingguan. Data, dokumentasi, serta catatan evaluasi diperiksa kembali sebelum dimasukkan agar sesuai dengan alur laporan. Saya menyesuaikan narasi laporan dengan pedoman resmi yang digunakan, sehingga struktur tetap sistematis dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam mengolah informasi dengan teliti dan profesional. • **Akuntabel** Setiap informasi yang dicantumkan dalam laporan bersumber dari kegiatan nyata yang sudah dilaksanakan. Dokumentasi kegiatan dilampirkan untuk memperkuat keabsahan laporan, sehingga tidak ada bagian yang sulit dipertanggungjawabkan. Penyusunan laporan juga dilakukan secara bertahap agar prosesnya transparan. Dengan demikian, laporan sejak awal sudah diarahkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. • **Adaptif** Dalam proses penulisan, saya menyesuaikan diri dengan format yang ditentukan serta pedoman yang berlaku. Beberapa bagian yang dirasa kurang sesuai segera saya revisi agar lebih tepat.

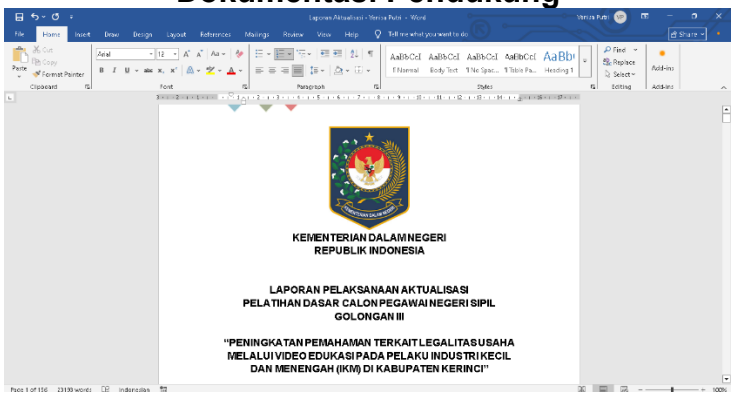
	Sikap adaptif ini membuat penyusunan laporan lebih fleksibel dan mudah diarahkan sesuai kebutuhan. • **Loyal** Penyusunan laporan aktualisasi menjadi wujud loyalitas terhadap instansi, karena laporan ini merupakan bukti resmi pelaksanaan kegiatan. Saya menyadari bahwa laporan bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan juga representasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, saya berupaya menjaga kualitas isi laporan agar dapat memperkuat citra baik instansi. Dengan begitu, laporan yang disusun benar-benar mencerminkan komitmen terhadap organisasi. • **Berorientasi Pelayanan** Dalam penyusunan laporan, saya memperhatikan agar bahasa yang digunakan sederhana dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Saya juga menyusun bagian evaluasi dengan ringkas agar bisa langsung memberi gambaran kepada pihak yang membutuhkan informasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi instansi maupun masyarakat. Dengan cara ini, laporan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga sarana pelayanan informasi yang bermanfaat. **2) Mengkonsultasikan Laporan Aktualisasi dengan Mentor** • **Harmonis** Konsultasi laporan dengan mentor dilakukan dalam suasana penuh penghargaan dan keterbukaan. Laporan ditunjukkan secara menyeluruh agar mentor dapat memahami isi dan alur yang disusun. Diskusi berjalan lancar, dan laporan dinyatakan sesuai tanpa perlu revisi. Keharmonisan komunikasi ini mendukung kelancaran proses dan memperlihatkan profesionalitas. • **Kompeten** Isi laporan dipaparkan dengan runtut, disertai bukti yang relevan sehingga mentor dapat langsung menilai kesesuaiannya. Penjelasan sistematis ini mencerminkan keterampilan dalam menyajikan informasi secara profesional. Dengan kemampuan tersebut, kualitas laporan terlihat lebih siap untuk difinalisasi. Kompetensi dalam

	penyusunan dan pemaparan terbukti penting dalam proses konsultasi. • **Akuntabel** Laporan yang dikonsultasikan benar-benar sesuai dengan fakta kegiatan di lapangan. Transparansi ini membuat mentor yakin bahwa laporan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Konsultasi menjadi momen penguatan akuntabilitas laporan, karena isi dan bukti diperlihatkan secara terbuka. Hal ini memastikan laporan sah digunakan sebagai dokumen resmi. • **Loyal** Konsultasi laporan menunjukkan loyalitas kepada instansi karena memperlihatkan komitmen untuk menuntaskan setiap tahapan secara sungguh-sungguh. Walaupun tidak ada revisi, meminta pengesahan mentor menjadi bukti bahwa setiap langkah penyusunan tetap menghormati prosedur organisasi. Dengan loyalitas ini, laporan memiliki legitimasi penuh dan dapat diakui secara resmi. • **Kolaboratif** Proses konsultasi laporan dengan mentor berlangsung secara terbuka dan saling menghargai. Saya menjelaskan isi laporan secara menyeluruh, sementara mentor memberikan tanggapan positif dan menyatakan laporan sudah sesuai tanpa perlu revisi. Komunikasi dua arah yang terjalin mencerminkan kerja sama yang efektif antara peserta dan pembimbing. Sikap saling memahami dan mendukung membuat proses validasi laporan berjalan lancar, efisien, dan menghasilkan kesepahaman bersama tanpa hambatan. **3) Memfinalisasikan Laporan Aktualisasi** • **Akuntabel** Tahap akhir ini dilakukan dengan memastikan semua isi laporan lengkap, valid, dan sesuai pedoman sebelum diajukan untuk tanda tangan mentor. Laporan diperiksa ulang agar tidak ada kesalahan teknis maupun isi. Dengan langkah ini, laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan penuh sebagai dokumen sah organisasi. • **Loyal** Finalisasi laporan mencerminkan loyalitas terhadap instansi. Dokumen yang sah dan

	ditandatangani mentor menjadi bukti bahwa tugas aktualisasi diselesaikan dengan tuntas. Hal ini menunjukkan kesungguhan dalam menjaga nama baik organisasi. Loyalitas terlihat dari dedikasi untuk menyelesaikan seluruh proses hingga akhir. • **Kompeten** Pemeriksaan ulang laporan dilakukan dengan cermat, mulai dari struktur, bahasa, hingga kelengkapan bukti. Setiap detail diperhatikan agar laporan terlihat profesional. Proses ini membuktikan keterampilan dalam menghasilkan dokumen resmi berkualitas. Kompetensi tersebut mendukung kepercayaan instansi terhadap kinerja aparatur. • **Berorientasi Pelayanan** Laporan yang telah difinalisasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip internal, tetapi juga sebagai sarana informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan program. Dengan laporan yang jelas, pimpinan dan pihak terkait dapat mengambil keputusan lebih tepat. Hal ini menunjukkan bahwa laporan juga memberi manfaat pelayanan publik secara nyata. • **Adaptif** Finalisasi laporan juga mencerminkan sikap adaptif, karena dalam prosesnya perlu menyesuaikan isi laporan dengan catatan dari mentor maupun kebutuhan instansi. Jika ada hal baru yang harus disertakan, laporan disesuaikan tanpa mengubah substansi utama. Fleksibilitas ini membuat laporan benar-benar relevan dan sesuai standar terbaru. Dengan sikap adaptif, laporan dapat diterima secara resmi tanpa hambatan.
2. Teknik Aktualisasi yang digunakan dan bukti fisik kegiatan / *evidence*	**1) Menyusun Laporan Aktualisasi** Teknik yang digunakan adalah penyusunan dokumen tertulis berdasarkan seluruh hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, saya mengompilasi data, dokumentasi, serta hasil evaluasi, kemudian menyusunnya ke dalam format laporan sesuai pedoman resmi. Proses penyusunan dilakukan secara bertahap agar isi laporan lebih rapi, sistematis, dan sesuai standar instansi.



Gambar 1. Dokumentasi Pengumpulan Data dan Dokumentasi Pendukung



Gambar 2. Penyusunan Draft Laporan Aktualisasi

2) Mengonsultasikan Laporan Aktualisasi dengan Mentor

Teknik yang digunakan adalah komunikasi langsung dengan mentor untuk mengonfirmasi isi laporan. Laporan diperlihatkan secara menyeluruh dan dinyatakan sesuai tanpa revisi.



Gambar 3. Dokumentasi Konsultasi Laporan Aktualisasi dengan Mentor

Nama : Venisa Putri, S.Psi
NIP : 200303312025042001
NDH : A10.4.40
Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci
Mentor : Ir. Raswan Putra, M.Si

Pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025, saya telah melakukan konsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi yang telah disusun.
Catatan Konsultasi:

Direvisinya laporan aktualisasi yang telah disusun dengan melakukan tanda tangan.

Kerinci, 06 Oktober 2025
Mentor

Ir. Raswan Putra, M.Si
NIP. 196806011993031010

Gambar 4. Catatan Hasil Konsultasi

3) Memfinalisasikan Laporan Aktualisasi
Teknik yang digunakan adalah pengecekan ulang laporan sebelum diajukan untuk tanda tangan. Setelah semua lengkap, laporan difinalisasi dan ditandatangani mentor.



BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada Hari :
Tanggal : Oktober 2025
Pukul : WIB
Tempat :

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan X Tahun 2025.

JUDUL : "Peningkatan Pemahaman Terkait Legalitas Usaha melalui Video Edukasi pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kerinci"
NAMA : Venisa Putri, S.Psi
NIP : 200303312025052001
PANGKAT/GOL : Penata Muda/III a
JABATAN : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama
INSTANSI : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ANGKATAN/KELOMPOK : XIV
NO. ABSEN : 40

Dan telah mendapatkan pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

COACH
Faisal Roza, S.Kom., M.Kom
NIP. 19761014 200112 1 001

PESERTA
Venisa Putri, S.Psi
NIP. 20030331 202505 2 001

PENGUJI
Andi Massalinri, AP., M.Si
NIP. 19731111 199311 1 002

MENTOR
Ir. Raswan Putra, M.Si
NIP. 19680601 199303 1 010

Gambar 5. Dokumentasi Laporan Aktualisasi yang Telah Ditandatangani Mentor

3. Deskripsi Proses dan Kualitas Kegiatan	**1) Menyusun Laporan Aktualisasi** Tahap penyusunan laporan aktualisasi dimulai dengan mengumpulkan semua data kegiatan yang sudah dilaksanakan. Data tersebut meliputi dokumentasi foto, hasil evaluasi, hingga catatan mingguan yang menjadi dasar penyusunan laporan. Setelah itu, data diolah ke dalam Bab IV yang berisi uraian kegiatan aktualisasi serta Bab V yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam proses ini, saya mencermati setiap bagian dengan teliti, sehingga laporan yang dihasilkan tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan analisis dari kegiatan yang dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas laporan sangat dipengaruhi oleh ketelitian dalam menyusun dan kejelasan narasi yang digunakan. Hasil dari tahapan ini adalah draf laporan aktualisasi yang lengkap, sistematis, dan siap untuk dikonsultasikan kepada mentor. **2) Mengkonsultasikan Laporan Aktualisasi dengan Mentor** Tahap berikutnya adalah mengkonsultasikan draf laporan kepada mentor. Dalam pertemuan ini, laporan ditunjukkan secara menyeluruh agar mentor dapat menilai kelengkapan dan kesesuaiannya dengan pedoman. Diskusi berlangsung dengan terbuka, dan mentor menyatakan bahwa laporan sudah sesuai sehingga tidak memerlukan revisi. Walaupun demikian, catatan kecil tetap diperhatikan agar laporan terlihat lebih sempurna saat difinalisasi. Kualitas kegiatan ini terletak pada komunikasi yang

	baik dan kesesuaian laporan dengan standar yang berlaku, sehingga laporan dapat langsung dilanjutkan ke tahap finalisasi. **3) Memfinalisasikan Laporan Aktualisasi** Tahap terakhir adalah memfinalisasi laporan aktualisasi. Proses ini dilakukan dengan memeriksa ulang isi laporan, melengkapi dokumen yang masih kurang, serta memastikan format penulisan sesuai pedoman resmi. Setelah semua lengkap, laporan diajukan untuk ditandatangani mentor sebagai bentuk pengesahan. Finalisasi ini menjadi bukti bahwa seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi telah ditutup dengan dokumen yang sah, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya finalisasi, laporan resmi menjadi arsip penting bagi instansi sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait.
4. Manfaat Kegiatan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Tugas Organisasi	Penyusunan hingga finalisasi laporan aktualisasi memberi manfaat yang besar dalam mendukung visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Kerinci, yaitu *"Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Lebih Baik."* Laporan yang disusun secara runtut, sistematis, dan dilengkapi bukti nyata merupakan salah satu wujud nyata tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Kegiatan ini juga selaras dengan misi meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya aparatur, karena proses penyusunan laporan melatih kedisiplinan, ketelitian, serta kemampuan untuk mengolah data menjadi narasi formal yang mudah dipahami. Selain itu, laporan yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi juga memberi kontribusi terhadap misi menumbuhkembangkan IKM yang tangguh dan berdaya saing, sebab informasi di dalamnya dapat dijadikan acuan dalam pembinaan berikutnya yang lebih efektif. Dari sisi penguatan nilai organisasi, kegiatan ini mencerminkan penerapan Pelayanan Prima dan Akuntabilitas karena laporan disusun dengan bahasa formal yang jelas, disertai bukti dokumentasi lengkap, sehingga mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai Integritas dan Tata Kelola juga tercermin dari kejujuran dalam menyajikan data sesuai fakta lapangan dan kepatuhan penuh terhadap pedoman resmi.

	Dengan demikian, laporan aktualisasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mendukung pengembangan IKM, serta meneguhkan komitmen instansi dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.
5. Analisis Dampak jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan NDS	**1) Dampak terhadap Satuan Kerja** • **Akuntabel** Tanpa akuntabilitas, laporan bisa berisi data yang keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat pimpinan meragukan kejujuran pegawai dan menurunkan kredibilitas organisasi. Akibatnya, instansi gagal menunjukkan transparansi dalam melaksanakan program. Kondisi ini melemahkan citra organisasi di mata publik maupun pemerintah daerah. • **Kompeten** Jika kompetensi diabaikan, laporan menjadi tidak runtut, bahasa kurang profesional, dan isinya sulit dipahami. Hal ini mengurangi nilai laporan sebagai bahan evaluasi resmi. Kelemahan ini menunjukkan bahwa aparatur tidak mampu memenuhi standar penulisan dokumen yang baik. Pada akhirnya, instansi dinilai kurang serius dalam menjalankan pembinaan IKM. • **Berorientasi Pelayanan** Tanpa orientasi pelayanan, laporan hanya sebatas formalitas administratif. Dokumen yang dihasilkan tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi maupun masyarakat. Hal ini membuat fungsi laporan sebagai sarana pelayanan informasi gagal tercapai. Dampaknya, instansi kehilangan kesempatan untuk memperkuat citra positifnya. • **Loyal** Tanpa loyalitas, laporan kehilangan identitas instansi. Logo resmi bisa tidak ditampilkan dengan konsisten atau gaya penulisan tidak mencerminkan standar organisasi. Kondisi ini merusak citra dan melemahkan rasa memiliki terhadap laporan. Pegawai juga dinilai tidak sungguh-sungguh mendukung nama baik instansi.

	• **Harmonis** Jika harmonis tidak dijalankan, komunikasi dalam penyusunan laporan bisa terganggu. Masukan dari mentor bisa diabaikan, sehingga laporan tidak lengkap. Ketegangan internal dapat memperlambat proses penyusunan. Pada akhirnya, laporan yang dihasilkan tidak memenuhi harapan organisasi. • **Adaptif** Jika adaptif diabaikan, laporan tidak akan menyesuaikan dengan pedoman terbaru. Dokumen bisa terasa usang dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini membuat laporan sulit dijadikan rujukan resmi. Kegagalan beradaptasi menurunkan kualitas tata kelola organisasi. **2) Dampak terhadap Masyarakat** • **Akuntabel** Tanpa akuntabilitas, laporan bisa menyesatkan masyarakat dengan informasi yang salah. Pelaku IKM bisa salah memahami hasil kegiatan karena laporan tidak sesuai fakta. Kondisi ini merusak kepercayaan masyarakat kepada instansi. Akibatnya, reputasi pemerintah menurun di mata publik. • **Kompeten** Jika laporan tidak kompeten, masyarakat kesulitan memahami informasi yang disajikan. Laporan terlihat tidak profesional dan membingungkan. Hal ini membuat pesan edukasi gagal tersampaikan. Masyarakat pun tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. • **Berorientasi Pelayanan** Tanpa orientasi pelayanan, laporan hanya berisi dokumen teknis yang kaku. Masyarakat merasa laporan tidak memberi nilai tambah atau informasi yang relevan. Akibatnya, laporan tidak digunakan sebagai referensi. Kondisi ini membuat kegiatan aktualisasi kehilangan dampak nyata bagi publik. • **Loyal** Tanpa loyalitas, laporan kehilangan identitas instansi yang resmi. Masyarakat bisa meragukan keaslian dokumen dan sumber informasinya. Hal ini membuat kepercayaan

	publik menurun. Peran pemerintah sebagai pembina IKM pun dipandang lemah. • **Harmonis** Jika penyusunan laporan tidak memperhatikan harmonisasi bahasa, gaya komunikasi bisa terasa kaku dan tidak ramah. Masyarakat akan enggan membaca laporan hingga selesai. Pesan penting tentang kegiatan pun tidak sampai. Hal ini membuat kegiatan aktualisasi kurang memberi manfaat. • **Adaptif** Jika laporan tidak adaptif, penyajiannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan istilah yang terlalu teknis membuat masyarakat sulit memahami isi laporan. Akibatnya, laporan tidak menarik perhatian audiens. Dampaknya, kegiatan aktualisasi tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Mentor
1	Senin/06 Oktober 2025	Mengkonsultasikan Laporan Aktualisasi kepada Mentor	Disetujuinya laporan aktualisasi yg telah disusun dengan membubuhi tanda tangan	
2				
3				
4				

c. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta		Venisa Putri, S.Psi		
Satuan Kerja		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
Tempat Aktualisasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci		
No	Tanggal/Waktu	Catatan Bimbingan	Hasil Capaian/Output	Paraf Coach
1				
2				

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2022). *Panduan Teknis Penulisan Rancangan Aktualisasi Dan Laporan Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dan Golongan III*. Jakarta: BPSDM Kemendagri.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.*

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2002). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya*.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2005). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/KEP/M.PAN/1/2005 tentang Perubahan atas Keputusan 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya*.

Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39647

Pemerintah Kabupaten Kerinci. (2019). *Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan*. Diakses dari Peraturan BPK.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Tahun 2025: 98 (310 hlm.), Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115 (310 hlm.). Diakses dari peraturan.bpk.go.id.

Tantowi, M., Iqbal, M., Rizky, M., Kurniawan, I., Mahabbati, L., Fazadilla, A. N., & Setiawati10, Y. (2023). Upaya Legalitas UMKM Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) di Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Wicara Desa*, *1*(6), 962-972.

Wahyudi, R. (2022). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan. SIBATIK JOURNAL: *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1*(5), 671-676.